

# LAPORAN PELAKSANAAN 2021 KEGIATAN

## Pengadilan Tinggi Jayapura

Jl. Tanjung Ria No. 98, Base "G", Jayapura

Telp. (0967) 541248, Fax. (0967) 541045

email: ptjayapura@yahoo.co.id

website : www.pt-jayapura.go.id

**01.** Keadaan perkara di  
Peradilan umum

Sumber Daya Manusia **02.**

**03.** Penegelolaan Keuangan,  
Sarpras dan TI

Peningkatan Pelayanan Publik  
dan Pengawasan **04.**

**PENGADILAN  
TINGGI  
JAYAPURA**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2021. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih belum sempurna, dan demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di tahun mendatang, segala kritik, rekomendasi, dan saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat diharapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Jayapura ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami, serta sebagai bahan evaluasi dan pengawasan demi peningkatan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Jayapura, 20 Januari 2021

**Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,**



**ASLI GINTING, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I. Pendahuluan .....	1
BAB II. Keadaan Perkara di Peradilan Umum .....	9
A. Keadaan Perkara .....	9
B. Penyelesaian Perkara .....	15
C. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	25
BAB III. Sumber Daya Manusia .....	27
1. Mutasi .....	32
2. Promosi .....	33
3. Pensiun .....	33
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat) .....	34
BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....	37
A. Pengelolaan Keuangan .....	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	54
BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik .....	61
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	61
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	62
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	66
BAB VI. Pengawasan .....	76
A. Internal .....	76
B. Evaluasi .....	80
BAB VII. Penutup .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi .....	82

## **BAB I PENDAHULUAN**

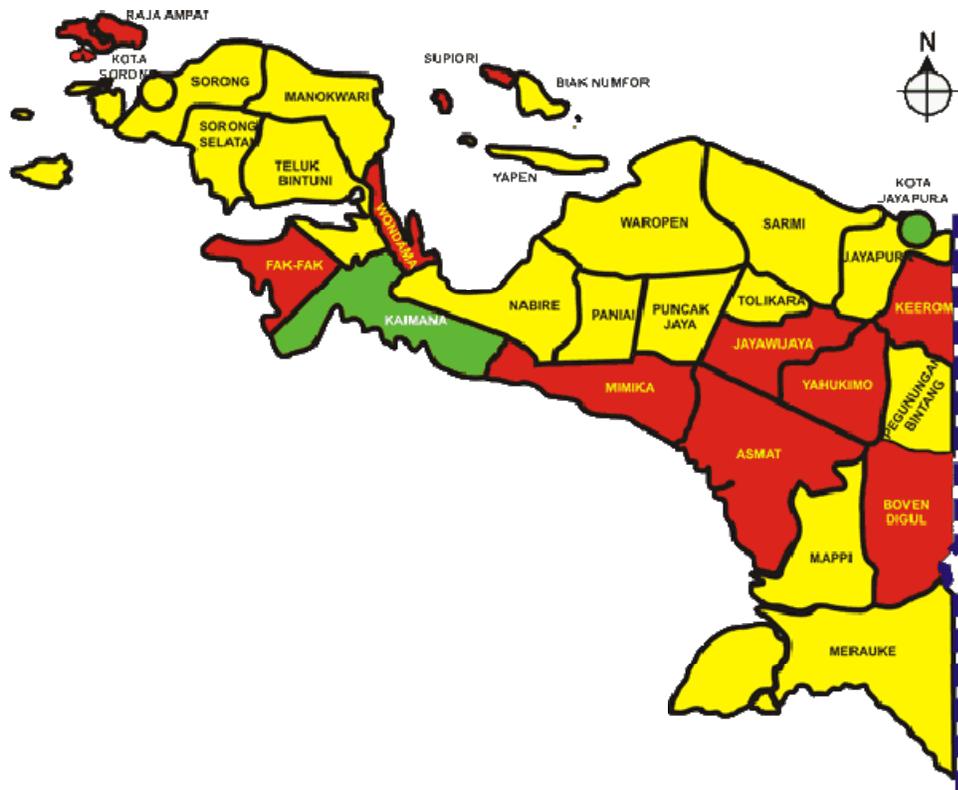
### **A. Sejarah Pengadilan Tinggi Jayapura**

Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Peradilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Jayapura dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1965 tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Hollandia (Jayapura) yang membawahi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka tantangan Pengadilan Tinggi Jayapura sangatlah berat. Lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini. Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI senantiasa menjaga kemandirian Peradilan dan meningkatkan profesionalitas aparturnya dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Tinggi Jayapura juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat maka, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat, dengan pembagian kabupaten/kota sebagai berikut :



Provinsi Papua (28 Kabupaten & 1 Kotamadya)	Provinsi Papua Barat (12 Kabupaten & 1 Kotamadya)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Asmat</li> <li>• Kabupaten Biak Numfor</li> <li>• Kabupaten Boven Digoel</li> <li>• Kabupaten Deiyai,</li> <li>• Kabupaten Dogiyai</li> <li>• Kabupaten Intan Jaya</li> <li>• Kabupaten Jayapura</li> <li>• Kabupaten Jayawijaya</li> <li>• Kabupaten Keerom</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Yapen</li> <li>• Kabupaten Lanny Jaya</li> <li>• Kabupaten Mappi</li> <li>• Kabupaten Memberamo Raya</li> <li>• Kabupaten Memberamo Tengah</li> <li>• Kabupaten Merauke</li> <li>• Kabupaten Mimika</li> <li>• Kabupaten Nabire</li> <li>• Kabupaten Nduga</li> <li>• Kabupaten Paniai</li> <li>• Kabupaten Pegunungan Bintang</li> <li>• Kabupaten Puncak</li> <li>• Kabupaten Puncak Jaya</li> <li>• Kabupaten Sarmi</li> <li>• Kabupaten Supiori</li> <li>• Kabupaten Tolikara</li> <li>• Kabupaten Waropen</li> <li>• Kabupaten Yahukim</li> <li>• Kabupaten Yalimo</li> <li>• Kota Jayapura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Fakfak</li> <li>• Kabupaten Kaimana</li> <li>• Kabupaten Manokwari</li> <li>• Kabupaten Manokwari Selatan</li> <li>• Kabupaten Maybrat</li> <li>• Kabupaten Pegunungan Arfak</li> <li>• Kabupaten Raja Ampat</li> <li>• Kabupaten Sorong</li> <li>• Kabupaten Sorong Selatan</li> <li>• Kabupaten Tambrauw</li> <li>• Kabupaten Teluk Bintuni</li> <li>• Kabupaten Teluk Wondama</li> <li>• Kota Sorong</li> </ul>

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Jayapura membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

No	Nama Pengadilan	Kelas
1.	Pengadilan Negeri Jayapura	IA
2.	Pengadilan Negeri Sorong	IB
3.	Pengadilan Negeri Manokwari	IB
4.	Pengadilan Negeri Merauke	II
5.	Pengadilan Negeri Wamena	II
6.	Pengadilan Negeri Biak	II
7.	Pengadilan Negeri Fakfak	II
8.	Pengadilan Negeri Serui	II
9.	Pengadilan Negeri Nabire	II
10.	Pengadilan Negeri Kota Timika	II
11.	Pengadilan Negeri Kaimana	II

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Jayapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara pada tingkat banding yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

### Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

### Kewenangan

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Jayapura disertai kewenangan lain berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok, diperlukan perangkat sarana serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan, yang akan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk *job description* (pembagian tugas) masing-masing aparatur.

Pencapaian pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura tidak saja berkaitan dengan bidang kepaniteraan saja yang menangani urusan administrasi perkara, tetapi sangat bergantung pula kepada bidang kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum.

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

#### **Fungsi**

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan;
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

### C. Visi, Misi dan Tujuan

#### + Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Visi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENGADILAN  
TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG**

#### + Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

- 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura

#### + Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun motto Pengadilan Tinggi Jayapura adalah :

**Membangun SDM Berintegritas**  
**Memberikan Pelayanan Berkualitas**

#### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
- e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

#### **E. Program Kerja**

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan yang tertuang lebih detail pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun program kerja tersebut adalah :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

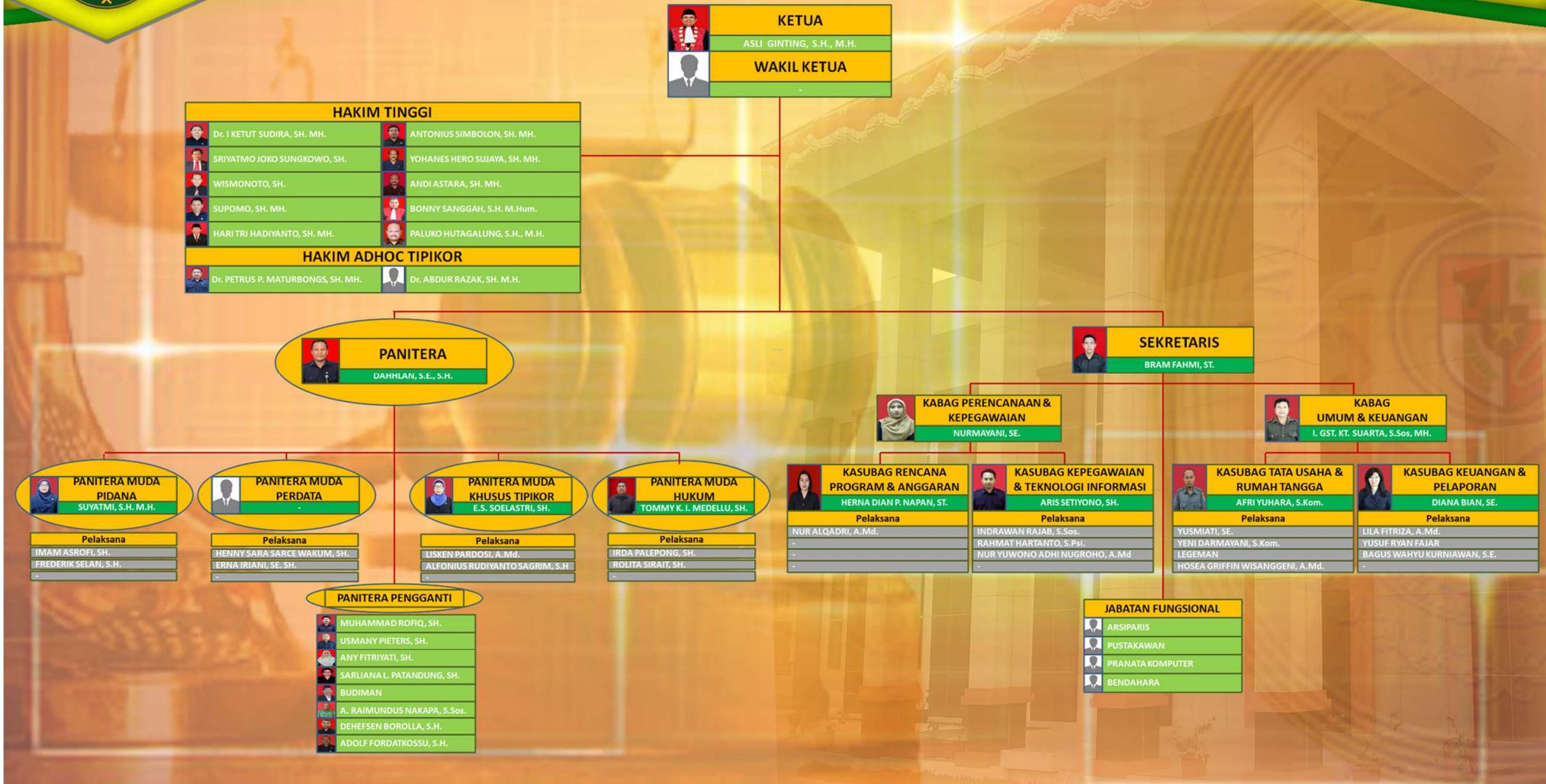
### 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

#### **F. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut:



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA

#### 1) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2020				
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI	Perikanan
1	PN Jayapura	585	947	40	51	
2	PN Wamena	92	46			
3	PN Merauke	146	147			1
4	PN Biak	99	150			
5	PN Nabire	136	60			
6	PN Serui	100	74			
7	PN Timika	175	249			
8	PN Manokwari	493	248	20	0	
9	PN Sorong	362	382			3
10	PN Fakfak	81	37			
11	PN Kaimana	30	71			
<b>Total</b>		<b>2299</b>	<b>2411</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>4</b>

#### 2) Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Rincian Perkara Perdata tahun 2021 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Perdata Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1	Jual Beli Tanah	1
2	Sewa Menyewa	1
3	Perceraian	20
4	Harta Bersama	1
5	Lain-lain	4
6	Objek Sengketa Tanah	1
7	Wanprestasi	14

8	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	53
9	Tanah	2
Total		97

Diagram Perkara Perdata Banding Masuk Tahun 2021



Rincian Perkara Pidana tahun 2021 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

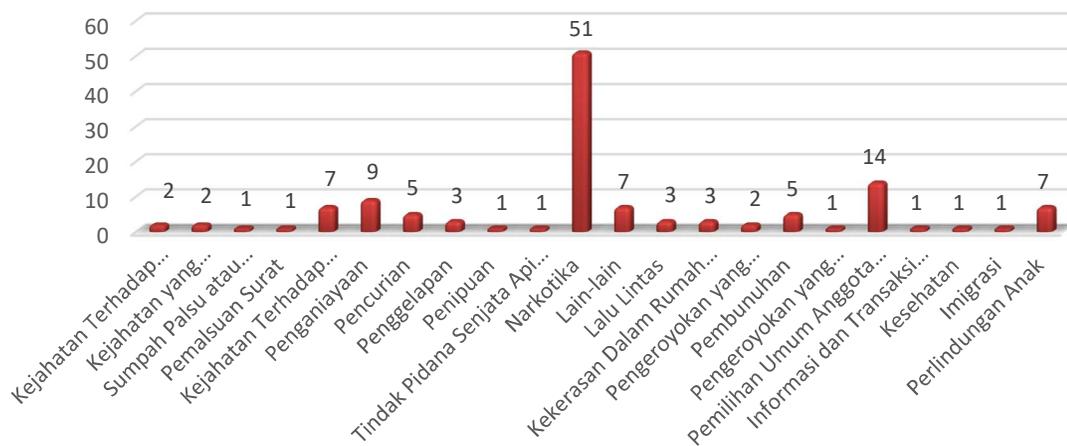
Tabel. Perkara Pidana Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	2
2	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	2
3	Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu	1
4	Pemalsuan Surat	1
5	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	7
6	Penganiayaan	9
7	Pencurian	5
8	Penggelapan	3
9	Penipuan	1
10	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	1
11	Narkotika	51
12	Lain-lain	7
13	Lalu Lintas	3
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
15	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	2
16	Pembunuhan	5
17	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	1

18	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat	14
19	Informasi dan Transaksi Elektronik	1
20	Kesehatan	1
21	Imigrasi	1
22	Perlindungan Anak	7
<b>Total</b>		<b>128</b>

Diagram Perkara Pidana Banding Masuk Tahun 2021

### STATISTIK PERKARA PIDANA BANDING MASUK TAHUN 2021



Rincian Perkara Pidana Khusus Perikanan tahun 2021 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Khusus Perikanan Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Perikanan	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

## Diagram Perkara Pidana Khusus Perikanan Banding Masuk Tahun 2021

### STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS PERIKANAN BANDING MASUK TAHUN 2021



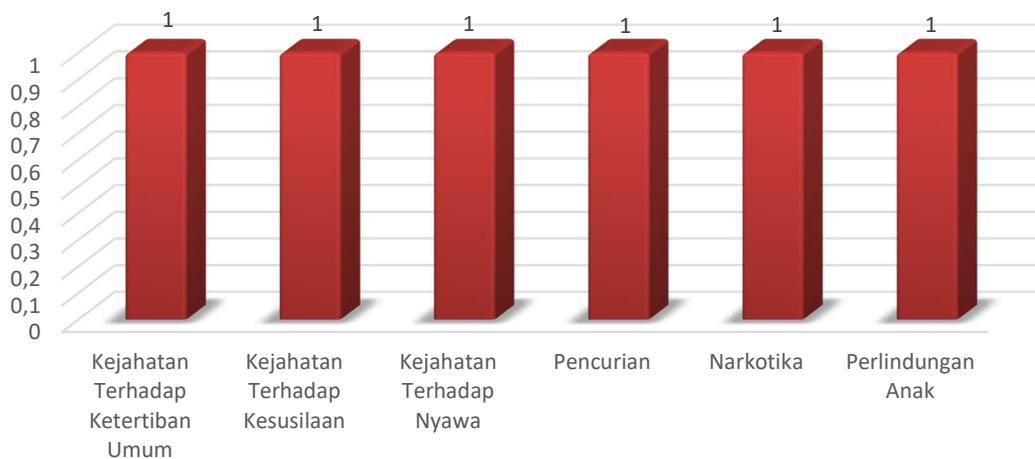
Rincian Perkara Pidana Khusus Anak tahun 2021 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Khusus Anak Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1
2	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	0
3	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	1
5	Penganiayaan	0
6	Pencurian	1
7	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	0
8	Narkotika	1
9	Lalu Lintas	0
10	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	0
11	Perlindungan Anak	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

Diagram Perkara Pidana Khusus Anak Banding Masuk Tahun 2021

**STATISTIK PERKARA PIDANA ANAK BANDING MASUK TAHUN 2021**



Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kerugian Keuangan Negara	19
2	Suap Menyuar	0
3	Penggelapan dalam Jabatan	0
4	Perbuatan Pemerasan	0
5	Perbuatan Curang	0
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0
7	Gratifikasi	0
<b>Total</b>		<b>19</b>

Diagram Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Tahun 2021



### 3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Tingkat Kasasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Kasasi			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	22	26	4	21
2	PN Wamena	4	0		
3	PN Merauke	4	3		
4	PN Biak	6	2		
5	PN Nabire	4	3		
6	PN Serui	5	0		
7	PN Timika	3	11		
8	PN Manokwari	2	2	9	0
9	PN Sorong	15	11		
10	PN Fakfak	2	0		
11	PN Kaimana	0	0		
<b>Total</b>		<b>67</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

### 4) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara PK			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	1	6	0	0
2	PN Wamena	0	0		
3	PN Merauke	0	0		
4	PN Biak	1	1		
5	PN Nabire	0	1		
6	PN Serui	0	0		
7	PN Timika	0	0		
8	PN Manokwari	0	2	0	0
9	PN Sorong	0	3		
10	PN Fakfak	0	0		
11	PN Kaimana	0	0		
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. PENYELESAIAN PERKARA

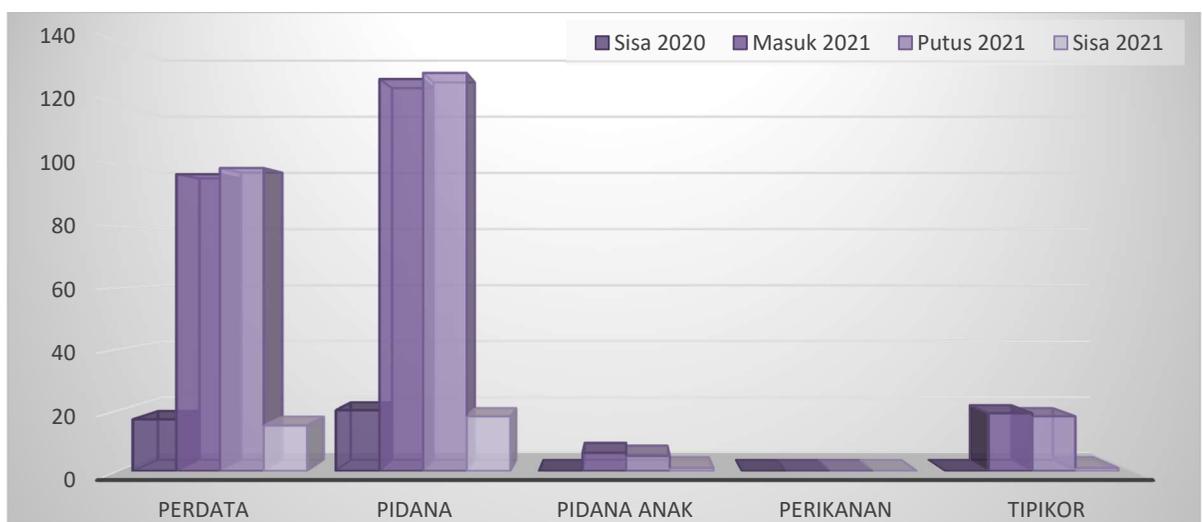
### 1) Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Selama tahun 2021 jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2021 Pada Pengadilan Tinggi Jayapura :

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perdata	17	97	99	15
2	Pidana	20	128	130	18
3	Pidana Anak	0	6	5	1
4	Perikanan	0	0	0	0
5	Tipikor	0	19	18	1
	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>250</b>	<b>252</b>	<b>35</b>

Diagram Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Jayapura



Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri yang terletak di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri Jayapura
- 2) Pengadilan Negeri Wamena
- 3) Pengadilan Negeri Merauke
- 4) Pengadilan Negeri Biak
- 5) Pengadilan Negeri Nabire
- 6) Pengadilan Negeri Serui

- 7) Pengadilan Negeri Kota Timika
- 8) Pengadilan Negeri Manokwari
- 9) Pengadilan Negeri Sorong
- 10) Pengadilan Negeri Fak Fak
- 11) Pengadilan Negeri Kaimana

Rekapitulasi jumlah perkara di 11 (sebelas) Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2021, sebagaimana data tabel dibawah ini :

Dalam tahun 2021, rekapitulasi sisa Perkara Pidana pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2020 : 335 perkara
- Masuk : 2152 perkara
- Putus : 2019 perkara
- Sisa : 468 perkara

Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	159	585	463	281
2	Pengadilan Negeri Wamena	7	87	93	1
3	Pengadilan Negeri Merauke	17	146	134	29
4	Pengadilan Negeri Biak	8	94	101	1
5	Pengadilan Negeri Nabire	1	136	137	0
6	Pengadilan Negeri Serui	2	89	84	7
7	Pengadilan Negeri Timika	35	170	177	28
8	Pengadilan Negeri Manokwari	20	235	220	35
9	Pengadilan Negeri Sorong	60	351	366	45
10	Pengadilan Negeri FakFak	0	77	73	4
11	Pengadilan Negeri Kaimana	2	27	29	0
<b>Total</b>		<b>311</b>	<b>1997</b>	<b>1877</b>	<b>431</b>

Grafik sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Khusus Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	2	23	22	3
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	4	4	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	0	5	5	0
4	Pengadilan Negeri Biak	0	15	15	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	0	18	18	0
6	Pengadilan Negeri Serui	0	9	9	0
7	Pengadilan Negeri Timika	0	5	5	0
8	Pengadilan Negeri Manokwari	0	6	6	0
9	Pengadilan Negeri Sorong	0	6	6	0
10	Pengadilan Negeri Fakfak	0	0	0	0
11	Pengadilan Negeri Kaimana	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>3</b>

Grafik sisa Perkara Pidana Khusus Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Khusus Perikanan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Merauke	0	1	1	0
2	Pengadilan Negeri Sorong	0	3	3	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Grafik sisa Perkara Pidana Khusus Perikanan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	2	40	19	23
2	Pengadilan Negeri Manokwari	20	20	29	11
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>34</b>

Grafik sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Dalam tahun 2021, rekapitulasi sisa Perkara Perdata pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2020 : 279 perkara
- Masuk : 2543 perkara
- Putus : 2518 perkara
- Cabut : 46 perkara
- Sisa : 254 perkara

Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	107	246	240	31	82
2	Pengadilan Negeri Wamena	1	19	16	0	4
3	Pengadilan Negeri Merauke	14	81	68	7	27
4	Pengadilan Negeri Biak	14	30	35	3	6
5	Pengadilan Negeri Nabire	6	60	62	0	4
6	Pengadilan Negeri Serui	9	16	22	0	3
7	Pengadilan Negeri Timika	33	104	100	0	37
8	Pengadilan Negeri Manokwari	22	95	91	0	26
9	Pengadilan Negeri Sorong	38	154	161	0	31
10	Pengadilan Negeri Fakfak	4	15	13	1	5
11	Pengadilan Negeri Kaimana	1	19	17	0	3
<b>Total</b>		<b>249</b>	<b>839</b>	<b>825</b>	<b>42</b>	<b>228</b>

Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	13	679	688	0	4
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	24	24	0	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	0	61	61	0	0
4	Pengadilan Negeri Biak	0	92	90	2	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	0	90	90	0	0
6	Pengadilan Negeri Serui	0	58	58	0	0
7	Pengadilan Negeri Timika	1	137	131	0	7
8	Pengadilan Negeri Manokwari	0	141	140	0	1
9	Pengadilan Negeri Sorong	0	219	219	0	0
10	Pengadilan Negeri Fakfak	0	21	21	0	0
11	Pengadilan Negeri Kaimana	0	52	52	0	0
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>1574</b>	<b>1574</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

Grafik sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	2	20	19	0	3
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	3	3	0	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	1	5	4	2	0
4	Pengadilan Negeri Biak	1	28	28	0	1
5	Pengadilan Negeri Nabire	0	2	2	0	0
6	Pengadilan Negeri Serui	0	0	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Timika	0	8	8	0	0

8	Pengadilan Negeri Manokwari	0	3	3	0	0
9	Pengadilan Negeri Sorong	1	9	10	0	0
10	Pengadilan Negeri Fakfak	0	1	1	0	0
11	Pengadilan Negeri Kaimana	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	11	51	41	10
2	Pengadilan Negeri Manokwari	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>10</b>

Grafik sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)



## 2) Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Adapun Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu ( Kurang dari 3 Bulan )	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu ( lebih dari 3 Bulan )
1	Perdata	114	96	3
2	Pidana	148	129	1
3	Pidana Anak	6	5	0
4	Perikanan	0	0	0
5	Tipikor	19	18	0
<b>Total</b>		<b>287</b>	<b>248</b>	<b>4</b>

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu ( Kurang dari 5 Bulan )	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu ( Lebih dari 5 Bulan )
1	Pengadilan Negeri Jayapura	1393	104
2	Pengadilan Negeri Wamena	138	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	280	0
4	Pengadilan Negeri Biak	222	4
5	Pengadilan Negeri Nabire	312	0
6	Pengadilan Negeri Serui	171	4
7	Pengadilan Negeri Timika	397	24
8	Pengadilan Negeri Manokwari	750	0
9	Pengadilan Negeri Sorong	759	11
10	Pengadilan Negeri Fakfak	73	32
11	Pengadilan Negeri Kaimana	98	3
<b>Total</b>		<b>4593</b>	<b>182</b>

### 3) Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Putus	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
1	Pengadilan Negeri Jayapura	2064	1585
2	Pengadilan Negeri Wamena	113	106
3	Pengadilan Negeri Merauke	321	311
4	Pengadilan Negeri Biak	226	129
5	Pengadilan Negeri Nabire	312	291
6	Pengadilan Negeri Serui	175	156
7	Pengadilan Negeri Timika	290	253
8	Pengadilan Negeri Manokwari	750	737
9	Pengadilan Negeri Sorong	540	495
10	Pengadilan Negeri Fakfak	105	69
11	Pengadilan Negeri Kaimana	101	99
<b>Total</b>		<b>4997</b>	<b>4231</b>

### 4) Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

Adapun jumlah perkara yang berhasil di Mediasi tahun 2021 di Wilayah Pengadilan tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Dimediasi tahun 2021	Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi
1	Pengadilan Negeri Jayapura	947	6
2	Pengadilan Negeri Wamena	12	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	58	1
4	Pengadilan Negeri Biak	44	2
5	Pengadilan Negeri Nabire	19	2
6	Pengadilan Negeri Serui	10	2
7	Pengadilan Negeri Timika	112	3
8	Pengadilan Negeri Manokwari	98	3
9	Pengadilan Negeri Sorong	73	6
10	Pengadilan Negeri Fakfak	1	1
11	Pengadilan Negeri Kaimana	0	0
<b>Total</b>		<b>1374</b>	<b>26</b>

### 5) Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Adapun jumlah perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi tahun 2021 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Anak tahun 2021	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2021
1	Pengadilan Negeri Jayapura	23	1
2	Pengadilan Negeri Wamena	4	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	5	0
4	Pengadilan Negeri Biak	15	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	18	1
6	Pengadilan Negeri Serui	9	0
7	Pengadilan Negeri Timika	5	1
8	Pengadilan Negeri Manokwari	6	0
9	Pengadilan Negeri Sorong	6	1
10	Pengadilan Negeri Fakfak	0	0
11	Pengadilan Negeri Kaimana	0	0
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>4</b>

## C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

### 1) Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Dalam tahun anggaran 2021 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan POSBAKUM kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk POSBAKUM dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA	Rp. 40.800.000,-	Rp. 40.800.000,-
PN WAMENA	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
PN MERAUKE	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN BIAK	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN NABIRE	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.500.000,-
PN SERUI	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN TIMIKA	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN MANOKWARI	Rp. 31.200.000,-	Rp. 26.000.000,-
PN SORONG	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
PN FAK-FAK	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN KAIMANA	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-

### 2) Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling/pelayanan terpadu dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan melaksanakan sidang di tempat / di luar gedung Pengadilan / Zitting Plaatz.

Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang/penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat dan menyelesaikan perkara dengan biaya ringan (murah). Dalam tahun anggaran 2021 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sidang keliling kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah

mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang diluar gedung Pengadilan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA		
PN WAMENA		
PN MERAUKE	Rp. 170.000.000,-	Rp. 169.962.000,-
PN BIAK		
PN NABIRE	Rp. 115.000.000,-	Rp. 114.950.000,-
PN SERUI		
PN TIMIKA		
PN MANOKWARI	Rp. 249.800.000,-	Rp. 245.640.000,-
PN SORONG		
PN FAK-FAK		
PN KAIMANA		

### 3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis (miskin).

Dalam tahun anggaran 2021 seluruh satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Tinggi Jayapura mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jayapura telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf. Adapun pembinaan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantaranya ialah:

#### a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Tinggi Jayapura menurut keadaan 31 Desember 2021, yaitu:

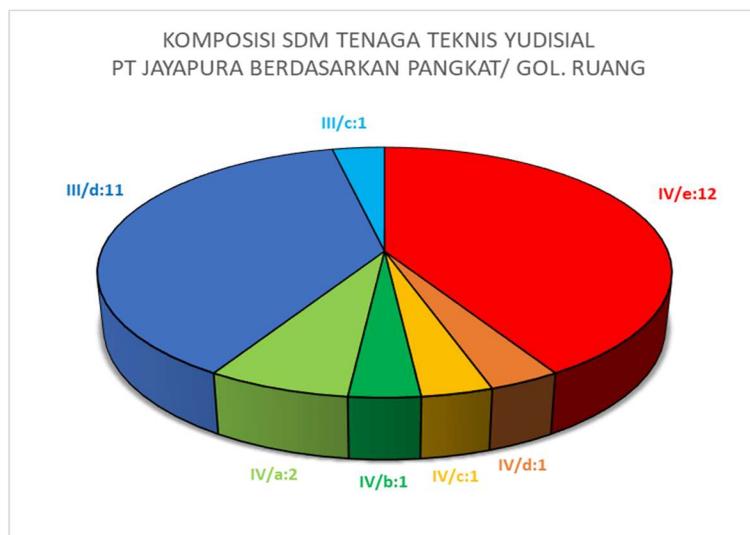
**Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	Asli Ginting, S.H., M.H. 195804041984031002	Pembina Utama IV/e	Ketua
2.	Adhar, S.H., M.H. 195904221986121001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
3.	Isjuaedi, S.H., M.H. 196106041986121001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
4.	Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H. 196002021986121001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
5.	Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. 196107051987021001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi

6.	Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. 196010051988031008	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
7.	Supomo, S.H., M.H. 195911291987021001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
8.	Wismonoto, S.H. 195908101988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
9.	Antonius Simbolon, SH, MH 196202081988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
10.	Yohanes Hero Sujaya, SH.,MH 195907061988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
11.	Andi Astara, SH.MH 196107201988031005	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
12.	Bonny Sanggah, S.H., M.Hum 196203021988031005	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
13	Paluko Hutagalung, S.H., M.H. 196007231992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
14	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H. 197005291995031002	Pembina IV/a	Hakim Adhoc Tipikor
15	Dr. Abdur Razak, S.H., M.H. 1967042702201104002	-	Hakim Adhoc Tipikor
16	Adi Prasetyo, S.H., M.H. 197002011996031002	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim Non Palu
17	Zia Ul Jannah Idris, S.H. 198505222008052001	Penata Tk. I III/d	Hakim Yustisial
18	Dahlan, S.E., S.H. 196512311990031034	Pembina Tk. I IV/b	Panitera
19	Suyatmi, S.H., M.H. 196909131989032002	Pembina IV/a	Panitera Muda Pidana
20	Hasan, S.H. 195912311983031083	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Perdata
21	Tommy Kenedy I Medellu, S.H. 196208171983031004	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Hukum
22	E. S. Soelastri, S.H. 196012191990032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Tipikor
23	A. Raimundus Nakapa, S.Sos 196005201981031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
24	Sarlina Lumiling Patandung, SH 196003271983032007	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
25	Usmany Pieter, S.H. 196005031985031006	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
26	Any Fitriyati, SH. 197410071993032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
27	Muhammad Rofiq, S.H. 196204031985031006	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
28	Dehefsen Borolla, S.H. 196112141983031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
29	Adolf Fordatkossu, S.H. 196204051982031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
30	Budiman, S.H. 196208301993031001	Penata III/c	Panitera Pengganti

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

- Pembina Utama (IV/e) : 12 orang
- Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 2 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 11 orang
- Penata (III/c) : 1 orang



Selain itu, komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Doktor (S3) : 3 orang
- Magister (S2) : 12 orang
- Sarjana (S1) : 15 orang



## b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan administrasi di Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2021 yaitu:

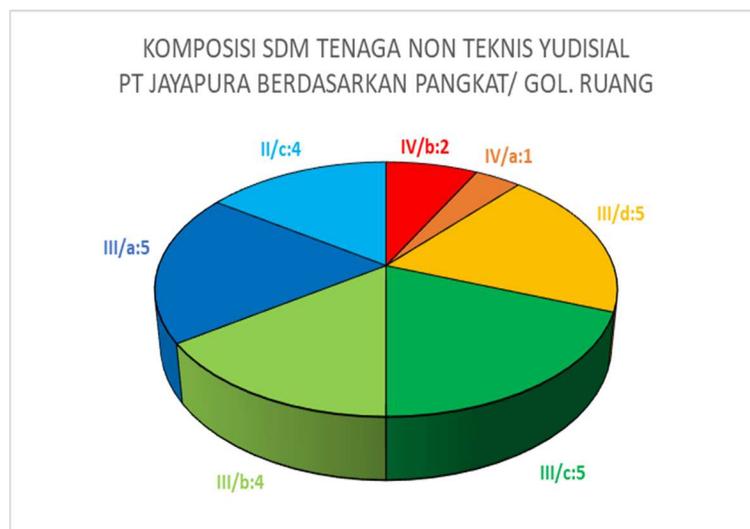
**Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	BRAM FAHMI, S.T., S.H. 198101222006041002	Pembina IV/b	Sekretaris
2.	I GST KT SUARTA, S.Sos., M.H. 196505131993031002	Pembina IV/b	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3.	NURMAYANI, S.E. 198012102005022001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4.	DIANA BIAN, S.E. 196708071992032009	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
5.	AFRI YUHARA, S.Kom. 197804042009041005	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga
6.	ARIS SETIYONO, S.H. 198409232006041005	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI
7.	HERNA DIAN P. NAPAN, S.T. 198509022009122004	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
8.	YENY DARMAYANI, S.Kom 198212042009042003	Penata Tk. I III/d	Pelaksana
9.	YUSMIATI, S.E. 198109232009042006	Penata Tk. I III/d	Pelaksana
10.	ERNA IRIANI, S.E. 19810316 200912 2001	Penata III/c	Pelaksana
11.	IRDA PALEPONG, S.H. 198704022006042001	Penata III/c	Pelaksana
12.	ROLITA SIRAIT, S.H. 198702142006042002	Penata III/c	Pelaksana
13.	ALFONIUS RUDIYANTO SAGRIM, S.H. 198308302010041001	Penata III/c	Pelaksana
14.	LEGEMAN 196509281993031003	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana
15.	HENNY SARA SARCE WAKUM, S.H. 197611231997122001	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana
16.	IMAM ASROFI, S.H. 198109202009121002	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana
17.	LISKEN PARDOSI, S.H. 197611052009042005	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana
18.	INDRAWAN RAJAB, S.Sos. 198811022019031003	Penata Muda III/a	Pelaksana
19.	RAHMAT HARTANTO, S.Psi. 199311132019031006	Penata Muda III/a	Pelaksana
20.	LILA FITRIZA, A.Md 198310112011012007	Penata Muda III/a	Pelaksana
21.	FREDERIK SELAN, S.H. 198612032012121005	Penata Muda III/a	Pelaksana
22.	BAGUS WAHYU KURNIAWAN, S.E. 199407302020121008	Penata Muda III/a	Pelaksana

23.	YUSUF RYAN FAJAR 198906162009121001	Pengatur II/c	Pelaksana
24.	NUR ALQADRI, A.Md. 198905252019031005	Pengatur II/c	Pelaksana
25.	NUR YUWONO ADHI NUGROHO, A.Md. 199408212020121002	Pengatur II/c	Pelaksana
26.	HOSEA GRIFFIN WISANGGENI, A.Md. 199803212020121001	Pengatur II/c	Pelaksana

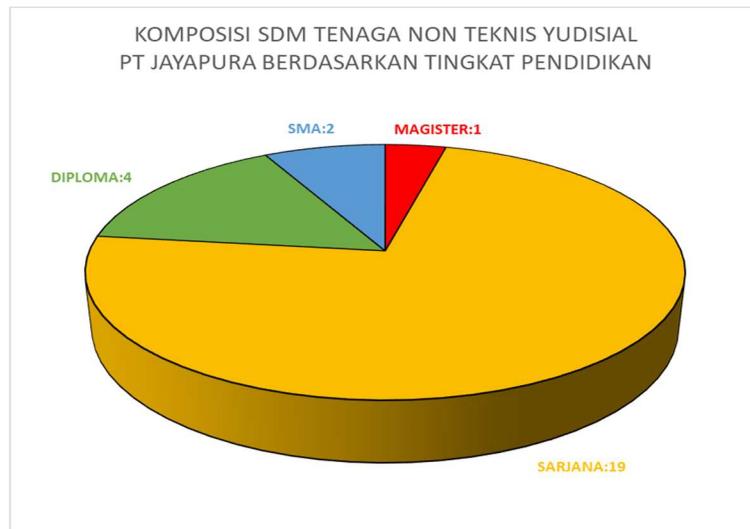
Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga Non teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

- Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 5 orang
- Penata (III/c) : 5 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 4 orang
- Penata Muda (III/a) : 5 orang
- Pengatur (II/c) : 4 orang



Selain itu, komposisi SDM tenaga non teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Magister (S2) : 1 orang
- Sarjana (S1) : 19 orang
- Diploma (D3) : 4 orang
- SMA/Sederajat : 2 orang



## 1. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional.

Adapun pelaksanaan mutasi selama tahun 2021, sebagai berikut:

### a. Mutasi Dalam Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Libenstein Setlight, A.Md.	Pelaksana PT Jayapura	Pelaksana PN Jayapura
2	Nur Alqadri, A.Md.	Pelaksana PN Merauke	Pelaksana PT Jayapura

### b. Mutasi Masuk Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Asli Ginting, SH. MH.	Wakil PT Pekanbaru	Ketua PT Jayapura
2.	Paluko Hutagalung, SH. MH	Hakim PN Tegal	Hakim Tinggi PT Jayapura
3.	Dr. Abdur Razak, SH. MH.	Hakim Adhoc PN Makasar	Hakim Adhoc PT Jayapura
4.	Adi Prasetyo, SH. MH.	Hakim PN Palembang	Hakim Non Palu PT Jayapura
5.	Muhammad Sakti, S.Pi.	Hakim Adhoc PN Ambon	Hakim Adhoc PN Sorong
6.	Johdi Medea, SE.	Hakim Adhoc PN Tual	Hakim Adhoc PN Sorong
7.	Alfonius Rudiyanto Sagrim, SH.	Pelaksana Mahkamah Agung	Pelaksana PT Jayapura

### c. Mutasi Keluar Papua

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Heru Pramono, SH. M.Hum.	Ketua PT Jayapura	Wakil Ketua PT DKI Jakarta
2.	H. Suwidya, SH. LLM.	Wakil Ketua PT Jayapura	Wakil Ketua PT Palangkaraya

3.	Boedi Soesanto, SH.	Hakim Tinggi PT Jayapura	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
4.	Ira Satiawati, SH. MH.	Hakim Tinggi PT Jayapura	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
5.	Abdul Wahid, S.Pi, M.Si.	Hakim Adhoc PN Sorong	Hakim Adhoc PN Bitung
6.	Okiawan Waseso, SH.	Pelaksana PN Nabire	Kepaniteraan MA
7.	Meliana Banne Layuk, SH.	Kasub Umum & Keuangan PN Serui	Bendahara PN Makale

## 2. Promosi

Selama tahun 2021, di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura telah terjadi promosi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel Daftar Pelantikan Jabatan Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Dessy Palumpak, SE.	Sekretaris PN Manokwari	Sekretaris PN Timika
2.	Alfrids Tanga, SE.	Sekretaris PN Merauke	Sekretaris PN Manokwari
3.	Semsi, ST.	Kasub Perencanaan, TI & Pelaporan PN Manokwari	Sekretaris PN Merauke
4.	Dehefsen Borolla, SH.	Panmud Pidana PN Sorong	PP PT Jayapura
5.	Adolf Fordatkossu, S.H.	Panitera PN Merauke	PP PT Jayapura

## 3. Pensiun

Pada tahun 2021 tercatat ada 4 (empat) pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memasuki masa purnabakti/pensiun.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yan Lamberth Rumaropen, S.Sos., S.H.	Panitera Pengganti PT Jayapura	Pensiun (Purnabhakti)
2.	Rachmad Sudarman, S.H., M.H.	Panitera PT Jayapura	Pensiun (Meninggal)
3.	Dorkas Tabita Drunyi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PT Jayapura	Pensiun (Meninggal)
4.	Hasan, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pensiun (Purnabhakti)

Adapun daftar Hakim dan Pegawai yang memasuki masa Purnabakti (pensiun) pada tahun 2021 di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim/Pegawai yang pensiun
1	PT JAYAPURA	4
2	PN JAYAPURA	-

3	PN WAMENA	1
4	PN MERAUKE	1
5	PN BIAK	1
6	PN NABIRE	1
7	PN SERUI	1
8	PN TIMIKA	1
9	PN MANOKWARI	-
10	PN SORONG	-
11	PN FAK-FAK	1
12	PN KAIMANA	2

### Formasi Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Ketua	Wakil	Hakim Karier	Hakim Adhoc	Panitera	Sekretaris	KABAG	PANMUD	KASUB	PP	JS/JSP	Staf	Honor
1	PT JAYAPURA	1	0	15	2	1	1	2	4	4	8	0	18	14
2	PN JAYAPURA	1	0	12	6	1	1	0	5	3	13	10	7	10
3	PN MERAUKE	1	1	3	4	1	1	0	3	3	2	2	3	6
4	PN NABIRE	1	1	5	0	1	1	0	3	2	4	5	4	7
5	PN TIMIKA	1	0	5	0	1	1	0	3	3	0	2	7	10
6	PN WAMENA	1	0	6	0	1	1	0	2	3	3	2	5	3
7	PN SERUI	1	0	4	0	1	1	0	3	2	4	2	2	6
8	PN BIAK	1	0	5	0	1	1	0	3	3	2	2	5	7
9	PN MANOKWARI	1	1	5	4	1	1	0	5	2	1	1	6	9
10	PN SORONG	1	0	6	4	1	1	0	3	3	5	4	5	6
11	PN FAK-FAK	1	1	4	0	1	1	0	3	3	0	2	4	11
12	PN KAIMANA	1	0	5	0	1	1	0	3	2	0	1	6	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>72</b>	<b>95</b>

#### 4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan setiap individu melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2021, yaitu sebagaimana terpapar dalam tabel berikut ini :

**Tabel Daftar Kegiatan Pembinaan SDM Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2021**

NO.	Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Pelatihan Online Kehumasan Pengadilan	Zia Ul Jannah Idris, S.H.	Hakim Yustisial	1 s.d. 5 Februari 2021

2	Bimtek ASN Bidang Administrasi Kepaniteraan	Any Fitriyati, S.H.	Panitera Pengganti	2 s.d. 4 Juni 2021
		Jacky S. L. mamengko, S.T., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
		Henny S. S. Wakum, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
3	Pelatihan <i>Online English Effective Presentation</i>	Bagus Wahyu Kurniawan, S.E.	CPNS Verifikator Keuangan	16 s.d. 24 Juni 2021
4	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja	Nurmayani, S.E.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	28 Juni s.d. 2 Juli 2021
5	Pelatihan <i>e-Learning</i> Penyusunan Laporan Kinerja	Indrawan Rajab, S.Sos.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	5 s.d. 9 Juli 2021
6	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Laporan Kinerja	Bram Fahmi, S.T., S.H.	Sekretaris	30 Agustus s.d. 3 September 2021
7	<i>E-Learning</i> Bendahara Pengeluaran	Lila Fitriza, A.Md.	Pengelola Daftar Gaji	16 Agustus s.d. 7 September 2021
		Yusuf Ryan Fajar	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	
8	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	Aris Setiyono, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & TI	6 September s.d. 15 Desember 2021
9	Pelatihan Online manajemen Laporan Kinerja	Tommy K. I. Medellu, S.H.	Panmud Hukum	20 s.d. 24 September 2021
		Herna Dian P. Napan, S.T.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	
10	Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Asli Ginting, S.H., M.H.	Ketua	25 s.d. 29 oktober 2021
		Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
		Andi Astara, S.H., M.H.		
		Antonius Simbolon, S.H., M.H.		
		Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.		
		Suyatmi, S.H., M.H.	Panmud Pidana	
11	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding	Any Fitriyati, S.H.	Panitera Pengganti	16 November s.d. 2 Desember 2021
12	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan Pengadilan Tingkat Banding	Paluko Hutagalung, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	17 November s.d. 1 Desember 2021
13	Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan MA RI	Aris Setiyono, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	22 s.d. 24 Desember 2021
		Indrawan Rajab, S.Sos.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	
14	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	Bagus Wahyu Kurniawan, S.E.	CPNS Verifikator Keuangan	15 Maret s.d. 19 Juli 2021
15	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II	Nur Yuwono Adhi Nugroho, A.Md.	CPNS Pengelola Sistem dan Jaringan	1 Juli s.d. 14 Oktober 2021
		Hosea Griffin Wisanggeni, A.Md.	CPNS Pengelola BMN	

**Jumlah SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat tahun 2021 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :**

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim yang Mengikuti Diklat	Jumlah Pegawai Teknis yang Mengikuti Diklat	Jumlah Prgawai Non Teknis yang mengikuti Diklat
1	PN JAYAPURA	13	15	7
2	PN WAMENA	4	4	4
3	PN MERAUKE	5	4	3
4	PN BIAK	5	5	6
5	PN NABIRE	5	7	4
6	PN SERUI	3	4	2
7	PN TIMIKA	4	3	5
8	PN MANOKWARI	8	4	5
9	PN SORONG	10	7	5
10	PN FAK-FAK	5	3	4
11	PN KAIMANA	3	3	6

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,**  
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Terdapat perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2021, baik DIPA 400022 dan DIPA 400023. Berikut daftar perubahan Realisasi anggaran tersebut :

Tabel. DIPA 400022

Realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</b>	Rp.19.704.182.000	Rp.18.398.270.086	Rp.1.305.911.914

❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp.10.655.318.000	Rp.12.960.968.000	Rp. 661.537.555
PN WAMENA	Rp. 9.217.968.000	Rp. 7.742.864.977	Rp.1.489.478.023
PN MERAUKE	Rp. 5.537.018.000	Rp. 5.329.058.225	Rp. 207.959.775
PN BIAK	Rp. 4.383.032.000	Rp. 4.143.983.020	Rp. 216.548.980
PN NABIRE	Rp. 4.795.972.000	Rp. 4.535.321.022	Rp. 260.650.978
PN SERUI	Rp. 3.991.673.000	Rp. 3.798.666.563	Rp. 193.006.437
PN TIMIKA	Rp. 4.499.659.000	Rp. 4.378.447.240	Rp. 121.211.760
PN MANOKWARI	Rp. 7.662.387.000	Rp. 6.739.083.010	Rp. 923.303.990
PN SORONG	Rp. 6.617.434.000	Rp. 6.507.297.564	Rp. 110.136.436
PN FAK-FAK	Rp. 4.889.207.000	Rp. 4.259.403.736	Rp. 634.203.264
PN KAIMANA	Rp. 3.996.295.000	Rp. 3.868.872.314	Rp. 127.422.656

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</b>	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0

❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 265.000.000	Rp. 264.300.400	Rp. 699.200
PN WAMENA	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN MERAUKE	Rp. 139.762.000	Rp. 139.500.000	Rp. 262.000
PN BIAK	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN NABIRE	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN SERUI	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN TIMIKA	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN MANOKWARI	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN SORONG	Rp. 420.314.000	Rp. 420.195.000	Rp. 119.000
PN FAK-FAK	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	Rp. 0
PN KAIMANA	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 0

Tabel. DIPA 400023

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 591.225.000	Rp. 515.168.690	Rp. 76.056.310

❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 03 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 244.570.000	Rp. 227.743.470	Rp. 26.293.530
PN WAMENA	Rp. 45.086.000	Rp. 42.001.900	Rp. 3.084.100
PN MERAUKE	Rp. 237.998.000	Rp. 234.558.000	Rp. 3.440.000
PN BIAK	Rp. 93.576.000	Rp. 86.576.000	Rp. 7.000.000
PN NABIRE	Rp. 164.064.000	Rp. 159.533.000	Rp. 4.531.000
PN SERUI	Rp. 88.784.000	Rp. 88.398.957	Rp. 385.043
PN TIMIKA	Rp. 104.966.000	Rp. 103.492.720	Rp. 1.473.280
PN MANOKWARI	Rp. 431.079.000	Rp. 394.165.450	Rp. 36.913.550
PN SORONG	Rp. 117.105.000	Rp. 105.170.095	Rp. 5.759.065
PN FAK-FAK	Rp. 75.496.000	Rp. 74.502.300	Rp. 993.700
PN KAIMANA	Rp. 38.554.000	Rp. 33.933.000	Rp. 4.621.000

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

#### Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura terletak di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base "G" berdiri diatas tanah seluas 7,856m<sup>2</sup> dan Luas gedung bangunan kantor Pengadilan Tinggi Jayapura sebelumnya 2,498m<sup>2</sup>, pada tahun anggaran 2014 sampai 2016 telah dilakukan rehabilitasi bangunan prototype yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Bahwa sampai dengan saat ini pembangunannya telah mencapai 100% (seratus persen).

#### Rumah Dinas

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki rumah dinas sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut:

- 12 unit rumah dinas type C, yang terletak di Jl. Tanjung Ria No.98
- 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Angkasa Indah Angkasa Pura
- 8 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Pasifik Indah III Pasir Dua
- 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Pematangan Hewan Entrop

#### **Rekapitulasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura**

Satker	Luas Gedung	Kondisi	Keterangan
PN JAYAPURA	800 M2	BAIK	-
PN WAMENA	2.240 M2	BAIK	-
PN MERAUKE	1.071 M2	BAIK	-
PN BIAK	1.130 M2	BAIK	-
PN NABIRE	1.376 M2	BAIK	-
PN SERUI	968 M2	BAIK	-
PN TIMIKA	2.237 M2	BAIK	-
PN MANOKWARI	1.478 M2	BAIK	-
PN SORONG	3.500 M2	BAIK	-
PN FAK-FAK	1.943 M2	BAIK	-
PN KAIMANA	500 M2	BAIK	-

#### **Rekapitulasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura**

Satker	Kondisi			Jumlah
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
PN JAYAPURA	10 Unit	- Unit	- Unit	- Unit
PN WAMENA	8 Unit	- Unit	- Unit	8 Unit
PN MERAUKE	14 Unit	- Unit	- Unit	14 Unit

<b>PN BIAK</b>	10 Unit	- Unit	- Unit	10 Unit
<b>PN NABIRE</b>	13 Unit	- Unit	- Unit	13 Unit
<b>PN SERUI</b>	3 Unit	6 Unit	- Unit	9 Unit
<b>PN TIMIKA</b>	3 Unit	6 Unit	- Unit	9 Unit
<b>PN MANOKWARI</b>	1 Unit	- Unit	9 Unit	10 Unit
<b>PN SORONG</b>	4 Unit	8 Unit	1 Unit	13 Unit
<b>PN FAK-FAK</b>	4 Unit	3 Unit	3 Unit	10 Unit
<b>PN KAIMANA</b>	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit

#### a) Pengadaan

Dalam tahun 2021 terdapat pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

1. Pengadaan Pengolahan Data dan Komunikasi pendukung Kepaniteraan dengan nilai kontrak Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang pengadaannya telah tercapai 100 %.

#### Rekapitulasi Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
<b>PN JAYAPURA</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN WAMENA</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN MERAUKE</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN BIAK</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN NABIRE</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN SERUI</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN TIMIKA</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN MANOKWARI</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN SORONG</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN FAK-FAK</b>	PC Komputer	3 Unit	Rp. 37.500.000
<b>PN KAIMANA</b>	PC Komputer	2 Unit	Rp. 25.000.000

#### b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dalam tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung baik itu yang bersumber dari belanja modal maupun dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

- Pemeliharaan yang bersumber dari belanja barang sebagai berikut :
  1. Perawatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 248.300.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

2. Perawatan halaman kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

**Rekapitulasi Biaya Pemeliharaan Gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura**

Satker	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Keterangan
PN JAYAPURA	Rp. 324.359.000	-
PN WAMENA	Rp. 276.128.000	-
PN MERAUKE	Rp. 189.250.000	-
PN BIAK	Rp. 126.560.000	-
PN NABIRE	Rp. 270.435.000	-
PN SERUI	Rp. 290.761.603	-
PN TIMIKA	Rp. 191.065.000	-
PN MANOKWARI	Rp. 235.224.000	-
PN SORONG	Rp. 305.250.000	-
PN FAK-FAK	Rp. 228.150.000	-
PN KAIMANA	Rp. 102.385.512	-

**c) Penghapusan**

Dalam tahun 2021, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

**Keadaan Aset Tanah Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2021**

❖ **Tanah**

Keadaan tanah Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	3.869	4.434.715.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Type C	1.999	2.262.757.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.856	13.531.758.000
<b>Jumlah</b>			<b>20.229.230.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Jayapura per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	4.252	6.671.801.000
2	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	509	702.801.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	608	798.000.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1.021	1.352.622.000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	303	376.398.000
6	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	89.750.000
7	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	494.760.000
8	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	53.438.000
<b>Jumlah</b>			<b>10.539.570.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Wamena per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.950	Rp. 4.422.601.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	2.046	Rp. 4.640.329.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	450	Rp. 1.080.675.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	780	Rp. 1.784.250.000.
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.609	Rp. 3.272.707.000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	5.800	Rp. 11.866.802.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 27.066.907.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Merauke per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.197	3.856.470.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24.540	37.914.300.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5.403	116.347.000
4	Tanah Padang Alang-Alang	1.200	1.140.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>43.027.117.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Biak per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3,324	1.148.410.000

2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8,324	7.666.992.000
<b>Jumlah</b>			<b>8.815.402.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Nabire per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.562	28.296.576.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.433	635.528.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.010	2.216.571.000
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.000	845.882.000
<b>Jumlah</b>			<b>31.994.557.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Serui per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	2.600	1.483.611.156
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.030	2.069.223.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang / Pertemuan	1.952	160.868.000
<b>Jumlah</b>			<b>3.713.702.156</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Kota Timika per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5.000	5.735.000.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.160	14.407.186.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	1.213.500.000
<b>Jumlah</b>			<b>21.355.686.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Manokwari per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	985	2.670.812.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	300	831.370.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	584	1.583.507.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.380	3.659.395.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.476	10.069.940.000

6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.300	19.461.675.000
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.250	254.625.000
<b>Jumlah</b>			<b>38.531.324.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Sorong per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	13.311	29.306.232.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.314	24.641.881.000
<b>Jumlah</b>			<b>53.948.113.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Fakfak per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1,615	148,580,000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1,292	994.945.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	655	504.403.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1,969	1.426.875.000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1,011	786.054.000
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,503	3.151.214.000
<b>Jumlah</b>			<b>7.012.071.000</b>

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Kaimana per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.901	230.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>230.000.000</b>

❖ **Gedung dan Bangunan**

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	12.978.715.000
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	5.850.171.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	-
4	Rumah Negara Golongan II Type B	2	1.144.191.000
5	Rumah Dinas Golongan II Type C	18	4.184.910.000
6	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	761.017.000
7	Pagar Permanen	2	1.046.631.000
8	Pagar Lainnya	1	69.350.000
<b>Jumlah</b>			<b>26.034.985.000</b>

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Jayapura Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	862.600.000
2	Bangunan Tempat Sidang /Zitting Plats	3	219.860.000
3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	3	862.610.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	8	1.341.523.400
<b>Jumlah</b>			<b>3.286.593.400</b>

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Wamena Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Gedung Bangunan Kantor Permanen	1	Rp. 11.282.744.964
2	Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen	7	Rp. 2.457.574.689
3	Rumah Negara Gol. I Tipe D Permanen	1	Rp. 864.604.256
4	Pagar Permanen	1	Rp. 148.861.500
5	Pagar Permanen	1	Rp. 75.221.500
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 14. 829.006.909</b>

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Merauke Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.366.234.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1	167.600.000
3	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	2	305.179.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	13	3.450.929.000
5	Rumah Negara Golongan II Lainnya	1	209.566.000
6	Pagar Permanen	1	520.357.000
<b>Jumlah</b>			12.019.865.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Biak Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	13.320.848.936
2	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.039.001.000
3	Rumah Negara Golongan II	10	2.975.124.796
4	Pagar Permanen	1	527.526.000
<b>Jumlah</b>			17.862.500.732

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Nabire Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	5.000.932.000
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	2	284.602.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	1	85.969.000
4	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.354.444.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	947.974.000
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	8	1.158.572.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	490.635.000
<b>Jumlah</b>			9.323.128.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Serui Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	11.103.143.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	2	132.972.000
3	Rumah Negara Golongan I Type C	7	1.457.325.000
4	Rumah Negara Golongan II Type D	2	237.136.000
5	Pagar Permanen	2	1.223.534.000
6	Taman	1	1.234.426.000
7	Bangunan Tempat Parkir	2	260.032.000
<b>Jumlah</b>			15.648.568.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kota Timika Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	21.809.339.000
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	207.527.000
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1.086.295.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	1.893.610.000
<b>Jumlah</b>			24.996.771.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Manokwari Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (2 Lantai)	1	269.974.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (1 Lantai)	1	30.000.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen/Zitting Plat	1	54.385.000
4	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	9	132.278.000
5	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	1	156.295.000
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	130.704.000
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Rapat & R. Arsip	1	250.000.000
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Sidang Sari	1	270.239.000
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Kesehatan & R. DYK	1	144.128.000
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Aula	1	547.000.000

11	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Tahanan Anak	1	93.000.000
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	193,108,000
13	Gedung Garasi/Pool Darurat	1	8,960,000
14	Gedung Pos Jaga	1	14.000.000
<b>Jumlah</b>			2.294.071.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sorong Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.756.836.000
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	301.562.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	386.755.000
4	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	6	1.505.972.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	405.925.000
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	15	1.810.557.000
7	Asrama Permanen	1	425.637.000
<b>Jumlah</b>			8.593.244.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Fakfak Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	178,843,000
2	Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	87,240,000
3	Rumah Negara Golongan II Type C	10	1,224,336,001
<b>Jumlah</b>			1,490,419,001

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kaimana Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	13.320.848.936
2	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.039.001.000
3	Rumah Negara Golongan II	10	2.975.124.796
4	Pagar Permanen	1	527.526.000
<b>Jumlah</b>			17.862.500.732

## 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

### a) Pengadaan persediaan Kantor

Dalam tahun 2021 terdapat pengadaan sarana dan persediaan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Dalam Tahun 2021 telah diadakan pembelian barang-barang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk DIPA 01, senilai Rp. 91,800,000,-
- Untuk DIPA 03, senilai Rp. 12,000,000,-

### b) Pemeliharaan Kendaraan dan Inventaris kantor

Dalam Tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 (sembilan) unit senilai: Rp. Rp.156.672.000,- (Seratus Limapuluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sebanyak 11 (sebelas) unit senilai: Rp. 16.500.000.- (Enam Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah)
3. Pemeliharaan inventaris kantor lainnya senilai: Rp. 150.104.000,- seratus lima puluh juta seratus empat ribu Rupiah).

### Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pemeliharaan Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
PN JAYAPURA	Rp. 134.666.599	Rp. 55.035.500
PN WAMENA	Rp. 83.616.000	Rp. 20.650.000
PN MERAUKE	Rp. 98.224.000	Rp. 57.150.000
PN BIAK	Rp. 84.500.000	Rp. 29.250.000
PN NABIRE	Rp. 98.224.000	Rp. 25.000.000
PN SERUI	Rp. 68.705.833	Rp. 16.537.343
PN TIMIKA	Rp. 176.412.000	Rp. 176.412.000
PN MANOKWARI	Rp. 167.232.000	Rp. 53.100.000
PN SORONG	Rp. 93.000.000	Rp. 37.250.000
PN FAK-FAK	Rp. 54.082.000	Rp. 35.750.000
PN KAIMANA	Rp. 66.000.000	Rp. 7.211.920

**Rekapitulasi Aset Kendaraan Roda Dua (2) maupun Roda Empat (4) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura**

Satker	Jumlah Kendaraan Roda Empat	Jumlah Kendaraan Roda Dua
<b>PN JAYAPURA</b>	4 Unit	17 Unit
<b>PN WAMENA</b>	2 Unit	9 Unit
<b>PN MERAUKE</b>	3 Unit	5 Unit
<b>PN BIAK</b>	2 Unit	10 Unit
<b>PN NABIRE</b>	3 Unit	5 Unit
<b>PN SERUI</b>	3 Unit	11 Unit
<b>PN TIMIKA</b>	5 Unit	8 Unit
<b>PN MANOKWARI</b>	3 Unit	19 Unit
<b>PN SORONG</b>	3 Unit	5 Unit
<b>PN FAK-FAK</b>	2 Unit	- Unit
<b>PN KAIMANA</b>	2 Unit	2 Unit

**c) Penghapusan**

Dalam tahun 2021, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2021 beserta mutasi selama tahun 2021 dapat kami uraikan sebagai berikut :

**Keadan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2021**

Keadan Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
3.01.03.04.002	Portable Generating Set	1	436.725.000
3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	698.500.000
3.01.03.05.999	Pompa Lainnya	1	9.400.000
3.02.01.01.001	Sedan	2	445.991.424
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	3	512.050.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	97.301.000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	2	2.400.000
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpanan	20	38.908.620
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	3.700.400
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	31	125.840.000

3.05.01.04.004	Rak Kayu	4	12.650.000
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	3	13.500.000
3.05.01.04.006	Filling Cabinet Kayu	2	7.080.000
3.05.01.04.007	Brandkas	2	23.800.000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	7.600.000
3.05.01.05.008	Papan Visual / Papan Nama	3	9.000.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	2.750.000
3.05.01.05.048	LCD Projector / Infocus	4	32.400.000
3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	21	15.520.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	84	443.327.033
3.05.02.01.003	Kursi Besi / Metal	169	273.191.032
3.05.02.01.005	Sice	10	120.891.724
3.05.02.01.008	Meja Rapat	9	45.491.631
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	12.440.889
3.05.02.01.022	Partisi	8	44.000.000
3.05.02.01.029	Backdrop Tv/Wardrobe	54	103.400.000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner	1	5.000.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	4.500.000
3.05.02.04.001	Lemari Es	3	7.500.000
3.05.02.04.003	A.C. Window	6	193.220.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	21	171.043.448
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4	120.000.000
3.05.02.06.002	Televisi	14	105.445.362
3.05.02.06.004	Tape Recorder	1	20.000.000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	2	16.000.000
3.05.02.06.008	Sound System	3	99.420.800
3.05.02.06.012	Wireless	3	26.148.900
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	6	4.042.800
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	5	1.008.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	4	1.730.500
3.05.02.06.034	Tangga Alumunium	1	2.250.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	2	88.000
3.05.02.06.036	Dispenser	3	5.058.000
3.05.02.06.037	Mimbar / Podium	2	5.440.862
3.05.02.06.040	Palu Sidang	1	73.000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	2	6.125.828
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	7.410.150
3.05.02.06.058	Gordyin / Kray	2	198.978.875

3.05.02.06.060	Asbak Tinggi	4	3.681.724
3.05.02.06.068	DVD Player	1	2.000.000
3.05.02.06.071	Kabel	10	13.000.000
3.06.01.01.036	Microphone / Wireless Mic	4	6.000.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	100.164.450
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	3.200.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	2	19.809.000
3.06.01.02.132	Video Conference	1	18.059.640
3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	4.449.200
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	10	3.300.000
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	1	10.000.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	1	12.616.000
3.07.02.04.999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	3	29.783.000
3.08.01.12.025	Stabilizer	1	5.000.000
3.10.01.01.004	Internet	1	86.480.000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1	61.750.000
3.10.01.02.001	P. C Unit	26	334.782.034
3.10.01.02.002	Laptop	22	315.850.018
3.10.01.02.003	Note Book	3	31.370.000
3.10.02.01.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1	25.000.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	77.104.875
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	28.400.000
3.10.02.03.017	External / Portable Hardisk	4	17.000.800
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.350.000
3.10.02.04.001	Server	3	159.357.000
3.10.02.04.002	Router	5	19.086.000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	1	3.800.000
3.10.02.04.033	Ethernet Converter	4	10.800.000
3.15.04.04.004	Closed Circuit Television (CCTV)	11	51.332.000
<b>Jumlah</b>		<b>854</b>	<b>6.009.767.015</b>

Selama tahun 2021, terjadi mutasi tambah peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
<i>Saldo Awal (1 Januari 2021)</i>	854	6.069.548.065
<i>Perubahan (1 Januari – 31 Desember 2021)</i>		
<i>Pembelian</i>	3	37.500.000
<i>Transfer Masuk (Hibah)</i>	24	86.979.000

Reklasifikasi Masuk	-	-
Koreksi Pencatatan	-	-
Reklasifikasi Keluar	-	-
Penghentian BMN dari penggunaan	169	184.260.050
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>712</b>	<b>6.009.767.015</b>

**Keterangan:**

- Pembelian :
  1. 3 Unit P.C Unit senilai Rp 37.500.000,-
- Transfer Masuk (Hibah) :
  1. 1 Unit Wireless Access Point senilai Rp 3.800.000,-
  2. 4 Unit Ethernet Converter senilai Rp 10.800.000,-
  3. 1 Unit Loudspeaker senilai Rp 1.098.000,-
  4. 1 Unit Dispenser senilai Rp 1.098.000,-
  5. 1 Unit Stabilizer senilai Rp 5.000.000,-
  6. 2 Unit Mesin Battery Set / Pengisi Accu senilai Rp 2.400.000,-
  7. 10 Unit Kabel senilai Rp 13.000.000,-
  8. 1 Unit P.C Unit senilai Rp 20.000.000,-
  9. 3 Unit Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya senilai Rp Rp 29.783.000

**Jaringan**

Keadaan Aset Jaringan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi	-	-
		-	-

**Aset Tetap Lainnya**

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1.	Monografi	12	12.973.451
2.	Buku Lainnya	38	3.766.125
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>12.973.451</b>

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. Implementasi e-Court

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Yang dimaksud dengan aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Sedangkan *Pengguna Terdaftar* adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal pendaftaran perkara Online, Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui mekanisme verifikasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019, kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan e-Court adalah:

1. Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat yang mendaftar sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Untuk memudahkan Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi wajib memiliki database Advokat yang telah disumpah pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
3. Pengadilan Tinggi wajib menunjuk petugas dengan Surat Keputusan untuk melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat.

Data pendaftaran advokat pada aplikasi e-Court yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

Jumlah Akun yang Mendaftar	Jumlah Akun yang Terverifikasi	Jumlah Akun yang belum Terverifikasi (Data Invalid)
382	361	21

Akun yang belum terverifikasi dikarenakan masih terdapat kekurangan, misalnya : tidak mengupload dokumen berita acara penyempahan atau salah dalam melakukan upload dokumen.

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif melaksanakan e-Court dengan memilih pengadilan pada saat akan mendaftar perkara baru.

Sedangkan data perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri yang didaftarkan melalui e-Court tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara e-Court	Keterangan
PN Jayapura	194 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Merauke	137 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Nabire	27 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Wamena	23 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Kota Timika	36 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Biak	38 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Serui	5 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Manokwari	239 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Sorong	19 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Fakfak	26 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Kaimana	0 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
<b>Jumlah</b>	<b>743 Perkara</b>	

## 2. Implementasi SIPP

Selama ini aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh aparaturnya pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

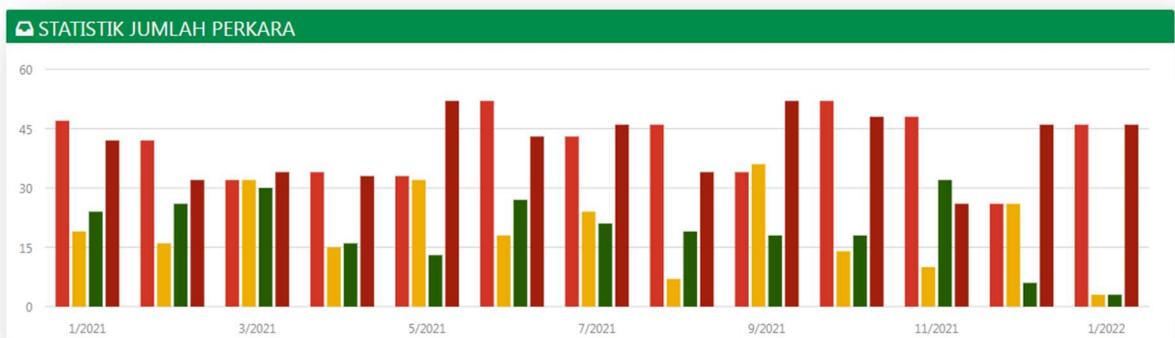
Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.

Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara *realtime*. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web.

Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disinkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu *Update* maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan sinkronisasi setidaknya – setidaknya tiga kali dalam sehari.

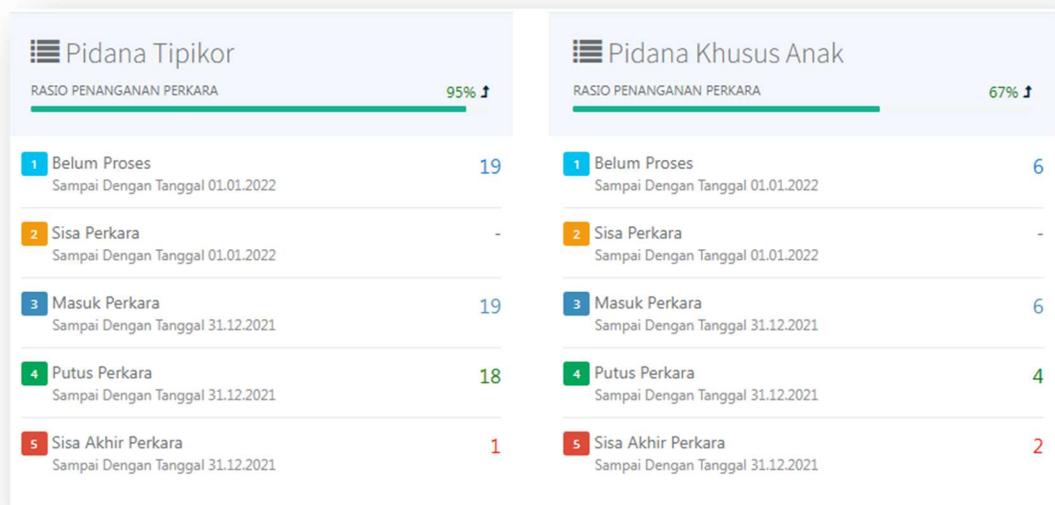
Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan terus diperbarui fitur – fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya.

Pengadilan Tinggi Jayapura telah melaksanakan penanganan perkara melalui SIPP yang dapat dimonitor kinerjanya pada grafik berikut:



Data penanganan perkara per tanggal 31 Desember 2021





Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Jayapura setidaknya-tidaknya memiliki 2 (dua) media dalam menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi Pengadilan Tinggi maupun secara langsung yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada pada Pengadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa *hard ware* dan *soft ware* dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih.

**a) Perangkat Keras (*Hard Ware*)**

Keadaan *hard ware* pendukung IT pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2021 yaitu :

Pengadilan	PC & Laptop	Server	Router	Modem
PT Jayapura	51 Unit	3 Unit	5 Unit	1 Unit
PN Jayapura	67 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit
PN Merauke	48 Unit	4 Unit	2 Unit	- Unit
PN Nabire	42 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit
PN Wamena	27 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit
PN Kota Timika	14 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit
PN Biak	16 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PN Serui	51 Unit	1 Unit	5 Unit	2 Unit
PN Manokwari	51 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit
PN Sorong	52 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit
PN Fakfak	37 Unit	1 Unit	1 Unit	- Unit
PN Kaimana	17 Unit	2 Unit	1 Unit	- Unit

**b) Perangkat Lunak (*Soft Ware*)**

Software yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Microsoft Office 2007 dan 2010, sedangkan untuk system operasinya adalah windows 2000, windows 7. Untuk menangkal virus menggunakan antivirus yang beragam mulai smadav, Norton, kaspersky dan PCMav.

**c) Jaringan Internet (*Internet Connection*)**

Jaringan internet yang telah terkoneksi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Astinet dengan *bandwidth 4mbps* dan Indihome dengan *bandwidth 100mbps* yang di koneksikan ke tiap bagian dalam ruangan dengan menggunakan wareless (WiFi) dan kabel (LAN). Sedangkan jaringan internet pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada umumnya menggunakan Astinet dan Indihome dengan kapasitas *bandwidth* rata-rata 2 – 10 *mbps*, namun untuk pengadilan di wilayah tertentu seperti PN Wamena menggunakan jaringan provider local yang terkoneksi dengan infrastruktur Palapa Ring Timur (Palapa Timur Telematika).

#### d) Website

Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan demikian website Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat Difable. Sehingga seluruh halaman website dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan perangkat lunak "screen reader" (pembaca layar). Selain itu tata letak website telah memenuhi Standar WAI ARIA ( Accessible Rich Internet Application) atau aplikasi internet untuk aksesibilitas yang memastikan aksesibilitas penuh bagi para pengguna website.

Dengan terselesaikannya penyesuaian standarisasi website ini, diharapkan lebih besar manfaatnya untuk transparansi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*). Namun, dalam pengembangan ke depannya, website tersebut perlu dikritisi dan diberikan saran yang konstruktif.

➤ Website resmi dan email Pengadilan Tinggi Jayapura dan Satuan Kerja:

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) Pengadilan Tinggi Jayapura  | : pt-jayapura.go.id        |
| Email                          | : ptjayapura@yahoo.co.id   |
| 2) Pengadilan Negeri Jayapura  | : pn-jayapura.go.id        |
| Email                          | : pnjayapura@yahoo.co.id   |
| 3) Pengadilan Negeri Sorong    | : pn-sorong.go.id          |
| Email                          | : pnsorong@yahoo.co.id     |
| 4) Pengadilan Negeri Biak      | : pn-biak.go.id            |
| Email                          | : pnbiak@gmail.com         |
| 5) Pengadilan Negeri Manokwari | : pn-manokwari.go.id       |
| Email                          | : pn.manokwari@yahoo.co.id |
| 6) Pengadilan Negeri Nabire    | : pn-nabire.go.id          |
| Email                          | : pn.nabire@yahoo.co.id    |
| 7) Pengadilan Negeri Merauke   | : pn-merauke.net           |

Email	: pn_merauke@yahoo.co.id
8) Pengadilan Negeri Kota Timika	: pn-timikakota.go.id
Email	: pnkotatimika@yahoo.co.id
9) Pengadilan Negeri Serui	: pn-serui.go.id
Email	: pn.serui@yahoo.co.id
10) Pengadilan Negeri Wamena	: pn-wamena.go.id
Email	: pnwamena.papua@gmail.com
11) Pengadilan Negeri Fakfak	: pn-fakfak.go.id
Email	: pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
12) Pengadilan Negeri Kaimana	: pn-kaimana.go.id
Email	: pnkaimana@gmail.com

➤ **Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Satuan Kerja:**

1) Pengadilan Negeri Jayapura	: sipp.pn-jayapura.go.id
2) Pengadilan Negeri Sorong	: sipp.pn-sorong.go.id
3) Pengadilan Negeri Biak	: sipp.pn-biak.go.id
4) Pengadilan Negeri Manokwari	: sipp.pn-manokwari.go.id
5) Pengadilan Negeri Nabire	: sipp.pn-nabire.go.id
6) Pengadilan Negeri Merauke	: sipp.pn-merauke.net
7) Pengadilan Negeri Kota Timika	: sipp.pn-timikakota.go.id
8) Pengadilan Negeri Serui	: sipp.pn-serui.go.id
9) Pengadilan Negeri Wamena	: sipp.pn-wamena.go.id
10) Pengadilan Negeri Fakfak	: sipp.pn-fakfak.go.id
11) Pengadilan Negeri Kaimana	: sipp.pn-kaimana.go.id

**e) Publikasi Perkara (One Day Publish)**

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura telah berbenah dalam Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern yang berbasis teknologi informasi terpadu.

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan setiap perkara yang telah putus di Pengadilan Tinggi Jayapura langsung di upload di direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga publik dapat melihat putusan perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jayapura. Dalam rangka menyediakan informasi perkara kepada masyarakat telah tersedia aplikasi SIPP-web yang dapat diakses oleh masyarakat pada laman web [banding.mahkamahagung.go.id](http://banding.mahkamahagung.go.id) Data pada aplikasi diperbaharui setiap hari, sehingga setiap perubahan tahap yang telah diinput dalam aplikasi dapat diakses oleh masyarakat dan setiap harinya dilakukan sinkronisasi.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura menyelenggarakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura. Perubahan yang dilakukan baik didalam maupun luar gedung Pengadilan Tinggi Jayapura serta inovasi-inovasi pelayanan publik yang dijalankan bertolak dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.

Dengan kerja keras dan semangat yang tinggi dari pimpinan dan jajarannya, Pengadilan Tinggi Jayapura berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat “A” dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor: 02/DJU/SK/OT01.3/1/2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus dan 1A Tahun 2020 Tanggal 6 Januari 2021.

Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar pelayanan publik dan lebih meningkatkan lagi dimasa mendatang baik dalam hal pelayanan publik maupun kinerja aparatur didalamnya.

Pengadilan Tinggi Jayapura juga berkomitmen membina dan memotivasi jajaran Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya untuk memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai program Dirjen Badan Peradilan Umum. Pimpinan dan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu telah melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada semua jajaran aparatur di Pengadilan Tinggi Jayapura dan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya serta memberikan pelatihan Assesor kepada Hakim Tinggi Pengawas sehingga dapat meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.

Berdasarkan hasil surveilan yang dilakukan Tim APM Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tim APM Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2021, berikut daftar Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperoleh sertifikat Akreditasi :

<i>Satker</i>	<i>Akreditasi</i>
<i>PN JAYAPURA</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN WAMENA</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN MERAUKE</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN BIAK</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN NABIRE</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN SERUI</i>	<b>“ B “</b>
<i>PN TIMIKA</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN MANOKWARI</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN SORONG</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN FAK-FAK</i>	<b>“ A Excelent “</b>
<i>PN KAIMANA</i>	<b>“ A Excelent “</b>

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, Pengadilan Tinggi Jayapura bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan bebas KKN, serta dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya PTSP masyarakat dan pencari keadilan dapat memperoleh informasi hanya dengan mendatangi meja pelayanan PTSP yang sudah terintegrasi dengan seluruh bagian, sehingga petugas PTSP dapat memberikan pelayanan secara cepat.



Petugas PTSP pada PT Jayapura terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Petugas Kepaniteraan dan Petugas Kesekretariatan.

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020, pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi Jayapura dijalankan dengan meningkatkan penerapan protokol kesehatan antara lain dengan Menyediakan wastafel dan



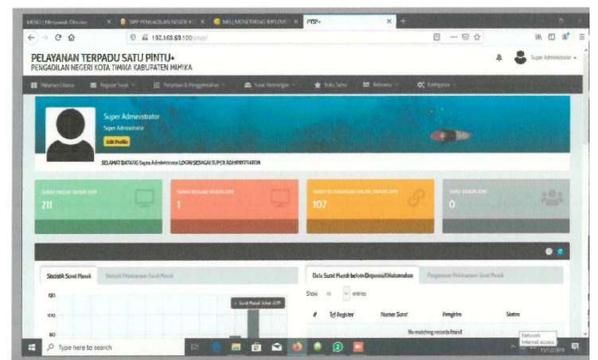
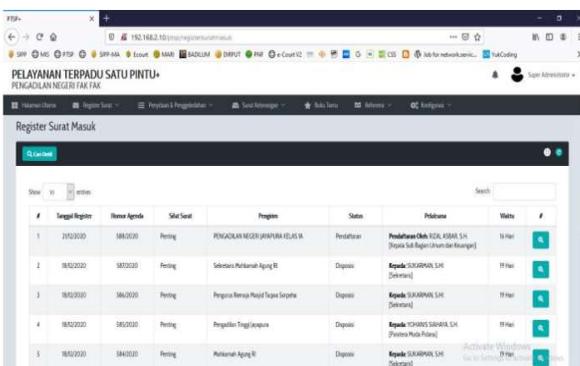
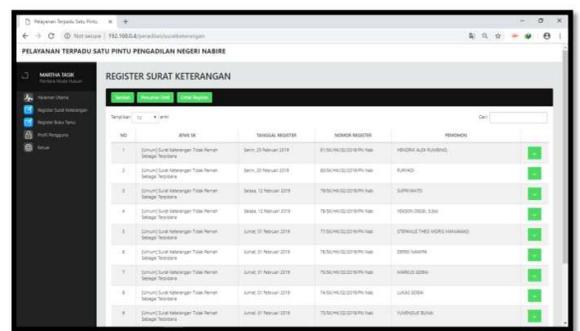
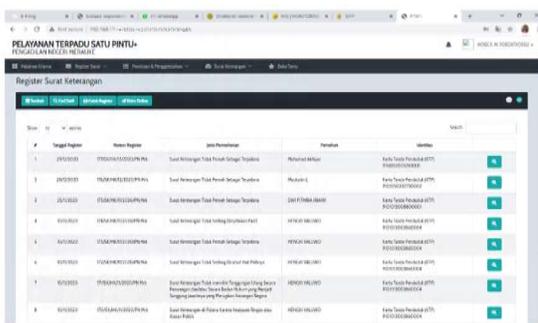
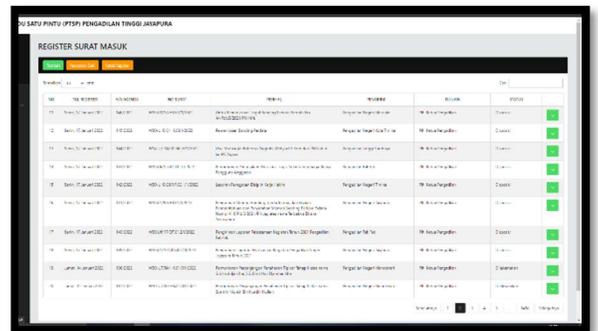
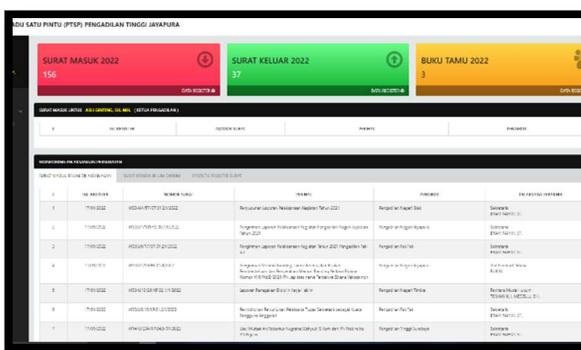
*handsanitizer/antiseptic* bagi pengunjung maupun petugas untuk mencuci tangan sebelum memasuki area pelayanan Pengadilan Tinggi Jayapura, melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang memasuki area Pengadilan Tinggi Jayapura, memasang pelindung untuk menjaga jarak dan kenyamanan antara petugas dan pengunjung, ruang tunggu dan ruang pelayanan yang diberi pembatas untuk tetap menjaga jarak (*social distancing*), dan sebagainya.



Untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan dalam PTSP, Pengadilan Tinggi Jayapura beserta seluruh satuan kerja dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura memanfaatkan fasilitas aplikasi PTSP. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang pada awalnya diperuntukkan untuk PTSP pada Pengadilan Negeri saja, namun mengingat fitur dan layanan dalam aplikasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan penyesuaian aplikasi sehingga dapat membantu proses pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab PTSP pada Pengadilan Tinggi.

Aplikasi PTSP digunakan untuk pencatatan surat masuk, surat keluar, buku tamu, surat keterangan online, dan sebagainya.

Tampilan aplikasi PTSP PT Jayapura dan beberapa Pengadilan Negeri dalam wilayah PT Jayapura sebagai berikut :



Dalam hal penerimaan tamu, apabila tamu hendak bertemu dengan Hakim atau pegawai Pengadilan, petugas PTSP akan meminta kartu identitas tamu untuk dilakukan pendataan tamu pada aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi. Tamu yang sudah didata pada aplikasi kemudian dipersilahkan menunggu di ruang tamu terbuka yang telah disediakan. Petugas PTSP akan menghubungi hakim atau pegawai untuk memberitahukan bahwa ada tamu yang akan menghadap dan menanyakan kesediaannya untuk menerima tamu tersebut.

Menu Buku Tamu pada Aplikasi PTSP PT Jayapura :

DU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

BUKU TAMU

Tampilkan 10 entri

NO	TANGGAL	TUJUAN	NAMA TAMU	KEPERLUAN	STATUS
11	Senin, 13 Desember 2021	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga AFRY YUHARA, S. Kom	PT Sentral Mitra Informatika Tbk	Bertemu dengan Kasub Umum untuk Mengambil Mesin Fotokopi HP	Diterima
12	Senin, 13 Desember 2021	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga AFRY YUHARA, S. Kom	TELKOM PROPERTY (Teya)	Mau Bertemu dengan bagian Umum	Diterima
13	Jumat, 10 Desember 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Raymond Izzac Peluussy	Bertemu dengan Pak Dahlan	Diterima
14	Jumat, 10 Desember 2021	Panitera Muda Hukum TOMMY K. I. MEDELU, SH.	Anshar	Melengkapi berkas penyempahan advokat	Diterima
15	Selasa, 07 Desember 2021	Panitera Muda Hukum TOMMY K. I. MEDELU, SH.	ANSHAR, SH	Mengantar Berkas Untuk Penyempahan Advokat	Diterima
16	Selasa, 30 November 2021	Panitera Muda Pidana SUVATMI, SH. MH.	CHRISTIAN TERRY DUARAMURY	Konsultasi masalah belum diterimanya putusan	Diterima
17	Jumat, 26 November 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Oliva Regina Clara	Konsultasi	Diterima
18	Rabu, 17 November 2021	Sekretaris BRAM FAHMI, ST.	IRIANES MENANTI	Bertemu dengan bapak Sekretaris	Diterima
19	Senin, 15 November 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Bapak Idris	Bertemu dengan Pak Panitera	Diterima
20	Kamis, 11 November 2021	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan DIANA BIAN, SE.	Bank Mandiri Jayapura	Bertemu dengan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Diterima

Sebelumnya 1 2 3 4 5 37 Selanjutnya

DU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

BUKU TAMU

TAMBAH BUKU TAMU

Tanggal \* 28/12/2021

Generate Nomor \* Ya

Nomor Agenda \* 47/2021

Nama Tamu \*

Alamat Tamu \*

No. Telepon \*

Keperluan \*

Tujuan \* Pilih

Kembali Simpan

NO	TANGGAL	TUJUAN	NAMA TAMU	KEPERLUAN	STATUS
11	Senin, 13 Desember 2021	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga AFRY YUHARA, S. Kom	PT Sentral Mitra Informatika Tbk	Bertemu dengan Kasub Umum untuk Mengambil Mesin Fotokopi HP	Diterima
12	Senin, 13 Desember 2021	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga AFRY YUHARA, S. Kom	TELKOM PROPERTY (Teya)	Mau Bertemu dengan bagian Umum	Diterima
13	Jumat, 10 Desember 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Raymond Izzac Peluussy	Bertemu dengan Pak Dahlan	Diterima
14	Jumat, 10 Desember 2021	Panitera Muda Hukum TOMMY K. I. MEDELU, SH.	Anshar	Melengkapi berkas penyempahan advokat	Diterima
15	Selasa, 07 Desember 2021	Panitera Muda Hukum TOMMY K. I. MEDELU, SH.	ANSHAR, SH	Mengantar Berkas Untuk Penyempahan Advokat	Diterima
16	Selasa, 30 November 2021	Panitera Muda Pidana SUVATMI, SH. MH.	CHRISTIAN TERRY DUARAMURY	Konsultasi masalah belum diterimanya putusan	Diterima
17	Jumat, 26 November 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Oliva Regina Clara	Konsultasi	Diterima
18	Rabu, 17 November 2021	Sekretaris BRAM FAHMI, ST.	IRIANES MENANTI	Bertemu dengan bapak Sekretaris	Diterima
19	Senin, 15 November 2021	Panitera DAHLAN, SE. SH.	Bapak Idris	Bertemu dengan Pak Panitera	Diterima
20	Kamis, 11 November 2021	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan DIANA BIAN, SE.	Bank Mandiri Jayapura	Bertemu dengan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Diterima

Sebelumnya 1 2 3 4 5 37 Selanjutnya

Setelah menerima pemberitahuan dari petugas PTSP, hakim atau pegawai akan menuju ruang tamu terbuka untuk menemui tamu. Dalam hal ini hakim atau pegawai dapat menolak atau tidak melayani tamu tersebut apabila keperluan tamu berkaitan

dengan masalah perkara sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010.

Dengan terlaksananya PTSP pada Pengadilan Tinggi Jayapura diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi di Pengadilan dan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, prima dan akuntabel.

### **C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Standar pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/03 /KPT/SK/4/2018 tanggal 9 April 2018 sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan.

Selain pelayanan kepada para pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Jayapura juga melakukan inovasi dalam pelayanan kepada aparatur pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

#### **1. Command Center**

Sebagai upaya peningkatan pengawasan dan alih ilmu pengetahuan (*transferknowledge*) dalam rangka perbaikan kualitas kinerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi terintegrasi, Pengadilan Tinggi Jayapura telah membangun fasilitas Command Center dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- ✓ Melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Negeri melalui CCTV secara realtime
- ✓ Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap jalannya kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri secara *virtual*
- ✓ Melakukan rapat/pertemuan/sosialisasi/pelatihan secara daring dengan Mahkamah Agung dan instansi terkait
- ✓ Monitoring data kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung secara online:



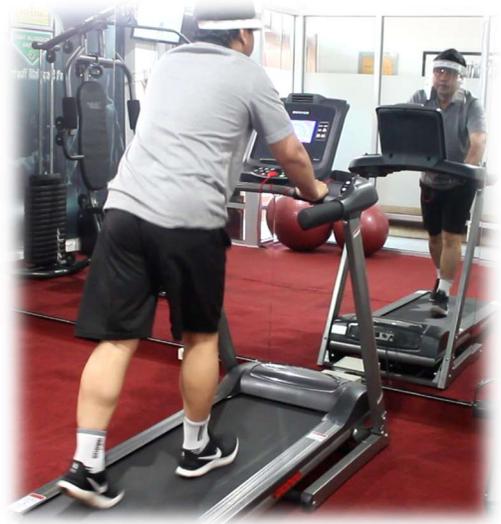
## 2. Sport Center

Dengan menyediakan sarana olahraga dan berolahraga secara rutin dapat meningkatkan produktifitas kerja sehari-hari *Mens Sana In Corpore Sano* bagi seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Adapun manfaat dari fasilitas ini adalah:

- ✓ Membantu mengelola stres, memberikan efek relaksasi, meningkatkan mood, serta menurunkan risiko depresi sehingga tidak mempengaruhi produktifitas kerja sehari-hari
- ✓ Memberikan energy untuk beraktifitas, stamina cukup, suasana hati yang positif adalah sumber energi untuk menjalankan pekerjaan dengan produktif.
- ✓ Meningkatkan kinerja otak, menjadi lebih fokus, teliti dan produktif dalam menjalankan pekerjaan

- ✓ Menurunkan resiko penyakit, meminimalisir penurunan produktifitas kerja



### 3. Aplikasi SIMULAN

Proses Usulan Kepegawaian yang selama ini dilakukan secara manual oleh bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Jayapura, kini dapat dilakukan secara digital dan online dan dimanfaatkan oleh para pengguna layanan (aparatur Peradilan Umum) di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengajukan usulan kepegawaian dengan lebih mudah, efisien dan efektif ke Pengadilan Tinggi Jayapura melalui layanan : SISTEM INFORMASI DAN MONITORING USULAN KEPEGAWAIAN (SIMULAN) dapat diakses melalui website pt jayapura dan alamat situs : <https://usulan.pt-jayapura.info/>

SIMULAN merupakan suatu bentuk inovasi dibidang kepegawaian yang berbentuk aplikasi layanan administrasi usulan kepegawaian meliputi kepangkatan, jabatan, mutasi, pensiun, pemberhentian dan kartu pegawai (karpeg, karis/karsu) yang berorientasi kepada pemberian informasi dan monitoring layanan usulan kepegawaian secara digital dan online dari Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai pihak yang menerima dan melakukan proses usulan, yang dapat diakses melalui internet baik melalui jaringan LAN (*Local Area Network*) maupun jaringan nirkabel dengan sarana komputer, laptop maupun smartphone.

Aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku pemberi layanan di bidang kepegawaian untuk seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura dan aparatur Pengadilan Negeri di Provinsi Papua dan Papua Barat selaku pengguna layanan dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri selaku administrator Satker.

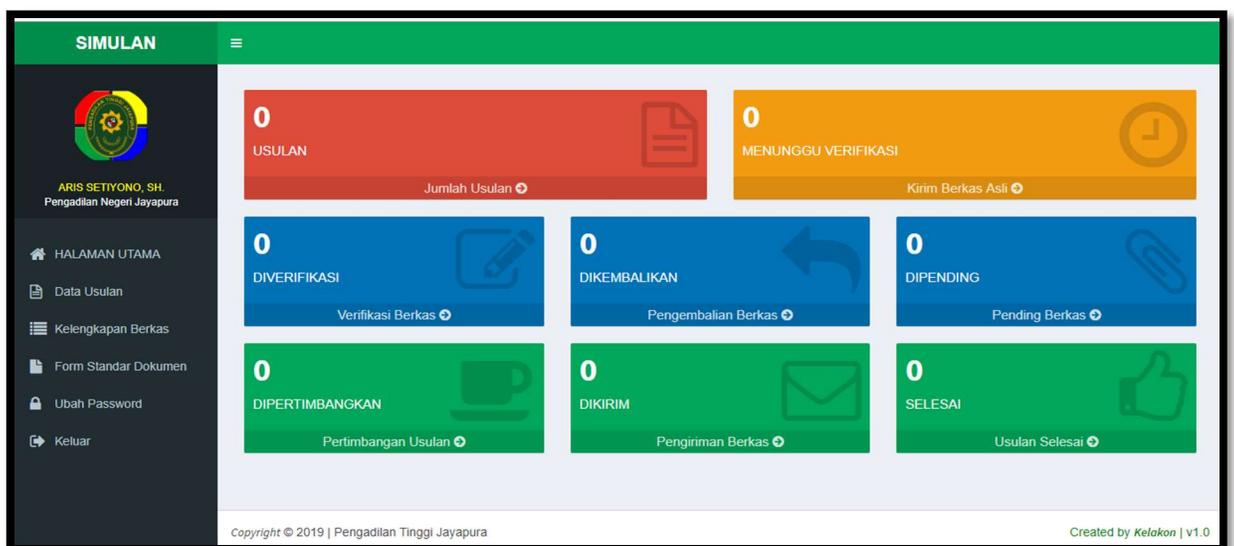
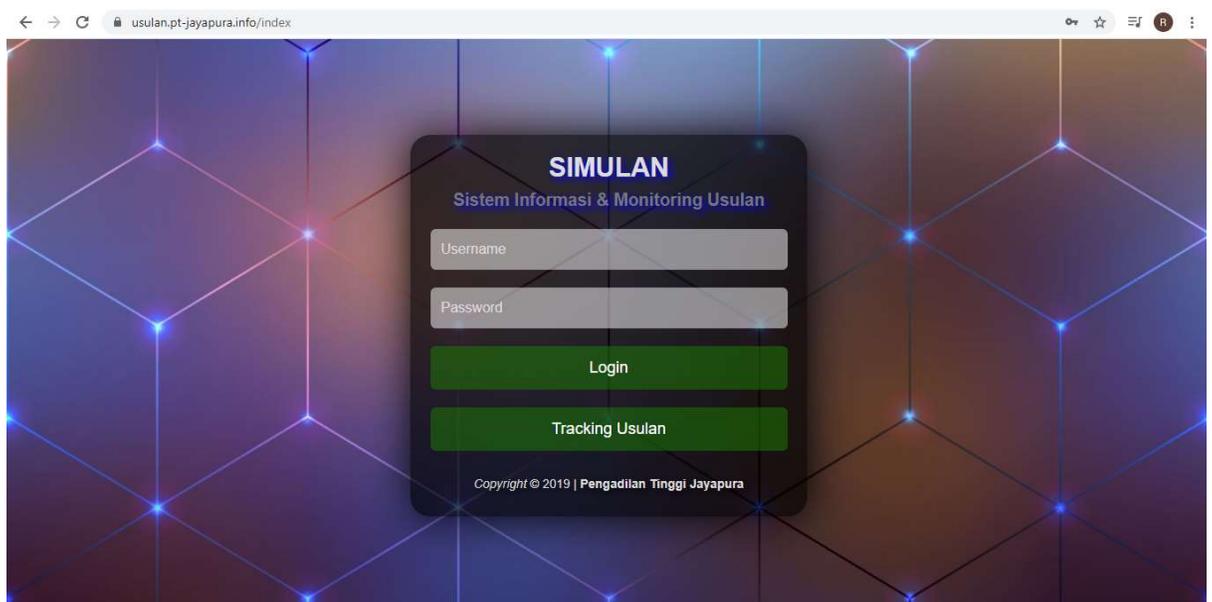
Beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain adalah:

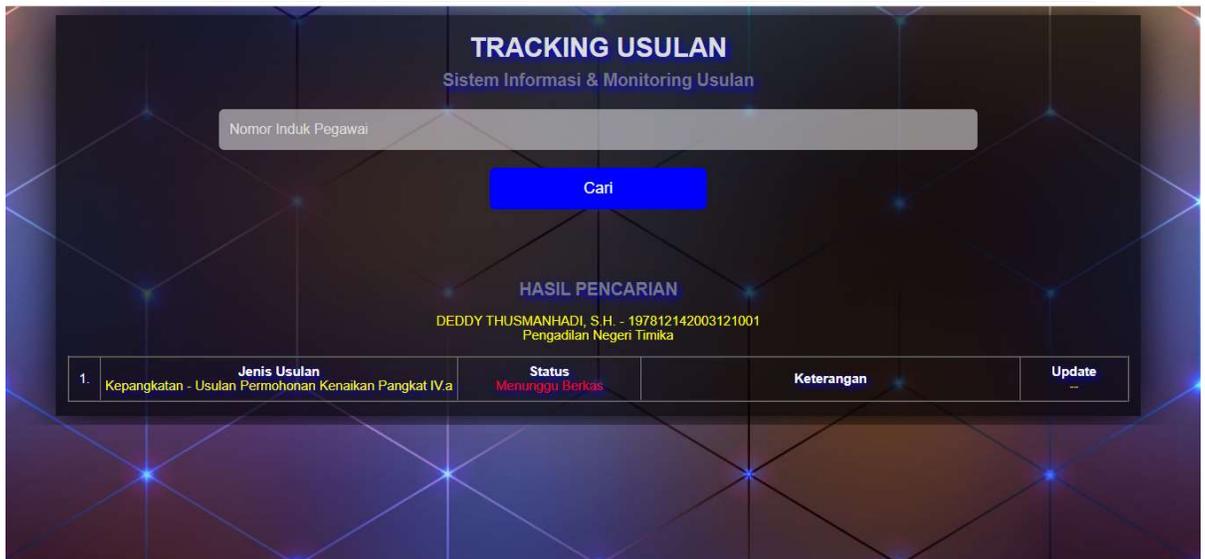
1. Registrasi usulan yang diajukan

2. Proses usulan yang terdiri dari : verifikasi, pertimbangan, pengiriman / penerusan usulan
3. Laporan proses usulan
4. Informasi proses usulan
5. Monitoring proses usulan

Dengan adanya program aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian ini, diharapkan kebutuhan informasi dan monitoring proses usulan kepegawaian dapat terlayani dengan cepat, akurat dan transparan secara digital dan online yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap administrator Satker yaitu petugas sub bagian Kepegawaian pada satuan kerja masing - masing melalui komputer, laptop maupun smartphone dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan jaringan internet dan tentunya akan sangat mendukung kinerja Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI .

Berikut beberapa tampilan dari Aplikasi SIMULAN :





#### 4. Aplikasi SIMONTI

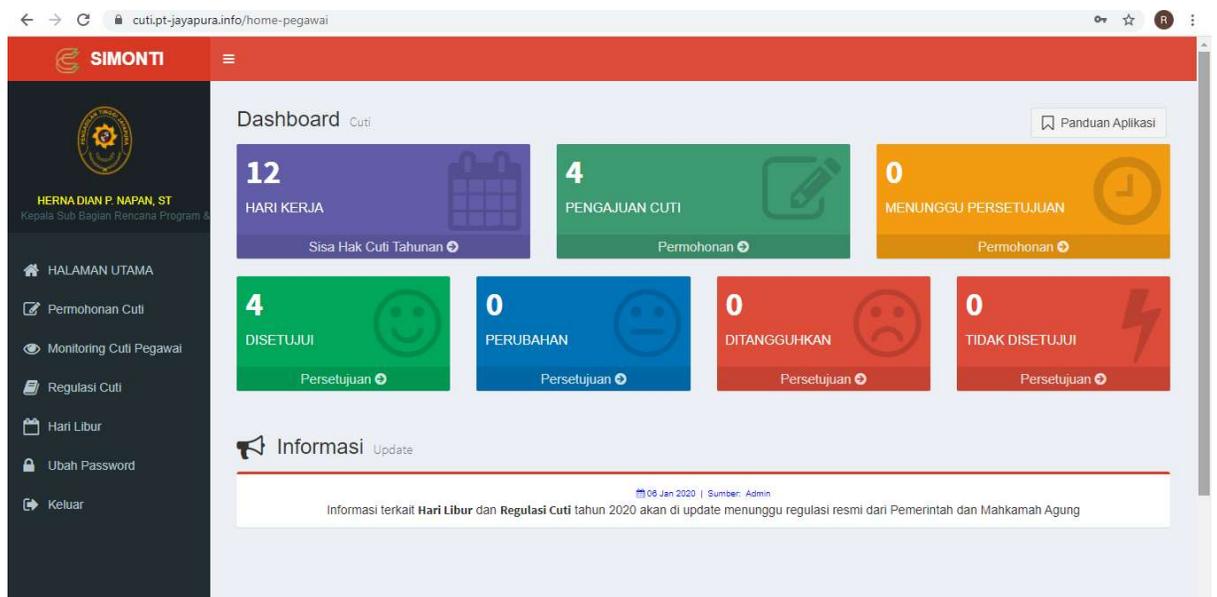
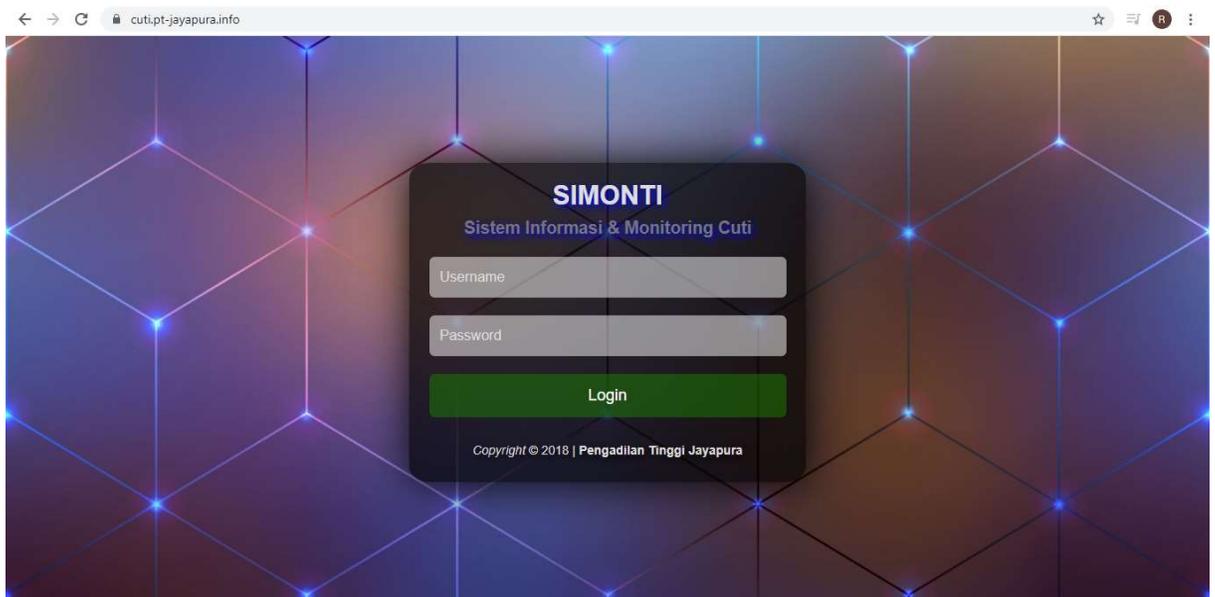
SISTEM INFORMASI CUTI PEGAWAI merupakan portal informasi dan pengelolaan administrasi cuti bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura serta Ketua Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura, dapat diakses secara online melalui website PT Jayapura atau melalui alamat situs <https://cuti.pt-jayapura.info/>

Pengelolaan administrasi cuti dimaksud adalah proses pelaksanaan cuti mulai dari pengajuan permohonan cuti sampai dengan penyampaian dokumen cuti setelah mendapatkan catatan/pertimbangan/persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan Catatan Cuti, Pertimbangan Cuti dan Persetujuan Cuti.

TUJUAN pemanfaatan Sistem Informasi & Monitoring Cuti ini adalah

- Memberikan Informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
  - Sisa Hak Cuti Tahunan 2 (dua) tahun sebelumnya (T-2), 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dan tahun berjalan (Tahun ini)
  - Informasi jumlah pengajuan permohonan cuti dan informasi proses persetujuan cuti (Disetujui/Perubahan/Ditangguhkan/Ditolak)
  - Informasi terkait regulasi atau ketentuan tentang cuti yang berlaku
  - Informasi tentang hari-hari libur, baik Libur Nasional, Libur Khusus Papua dan Cuti Bersama
- Mempermudah proses pengajuan permohonan cuti dengan formulir standar sesuai ketentuan
- Mempermudah panyampaian dan akses untuk mendapatkan dokumen cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pencatatan dan monitoring cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pengarsipan dokumen cuti secara elektronik

Berikut beberapa tampilan Aplikasi SIMONTI :



## 5. Aplikasi SIDOEL

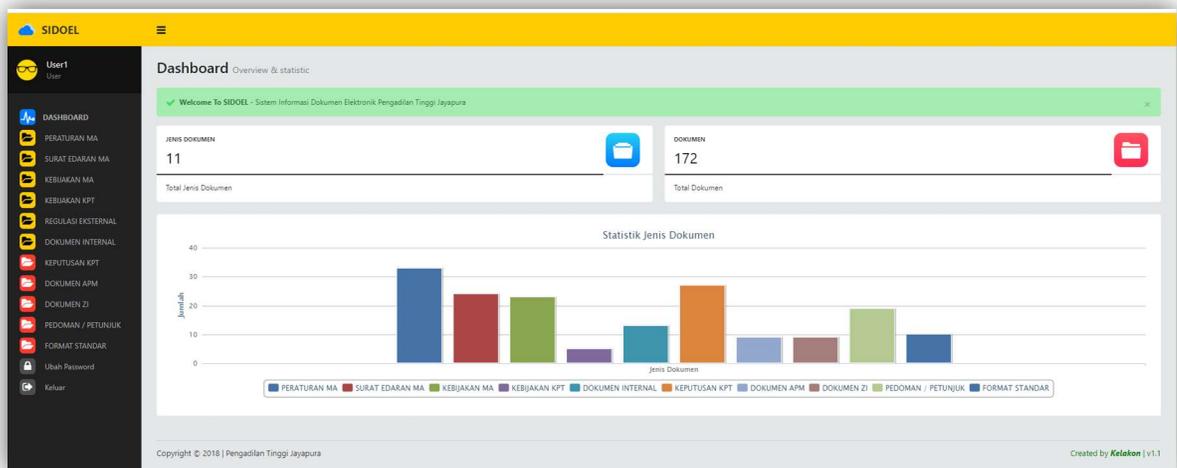
SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK merupakan portal informasi dan pengarsipan dokumen/regulasi secara elektronik baik internal maupun external dalam satu sistem aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Jayapura, portal aplikasi ini dapat diakses secara online melalui alamat situs <https://sidoel.pt-jayapura.info/>

Informasi dan pengarsipan dokumen/regulasi secara elektronik dimaksud mencakup tentang dokumen/regulasi terkait Kebijakan Mahkamah Agung, Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi, Dokumentasi APM, Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas serta mengakomodir juga terkait dokumen/format/formulir standar yang digunakan dalam menunjang kinerja pengadilan

TUJUAN pemanfaatan dari aplikasi ini adalah

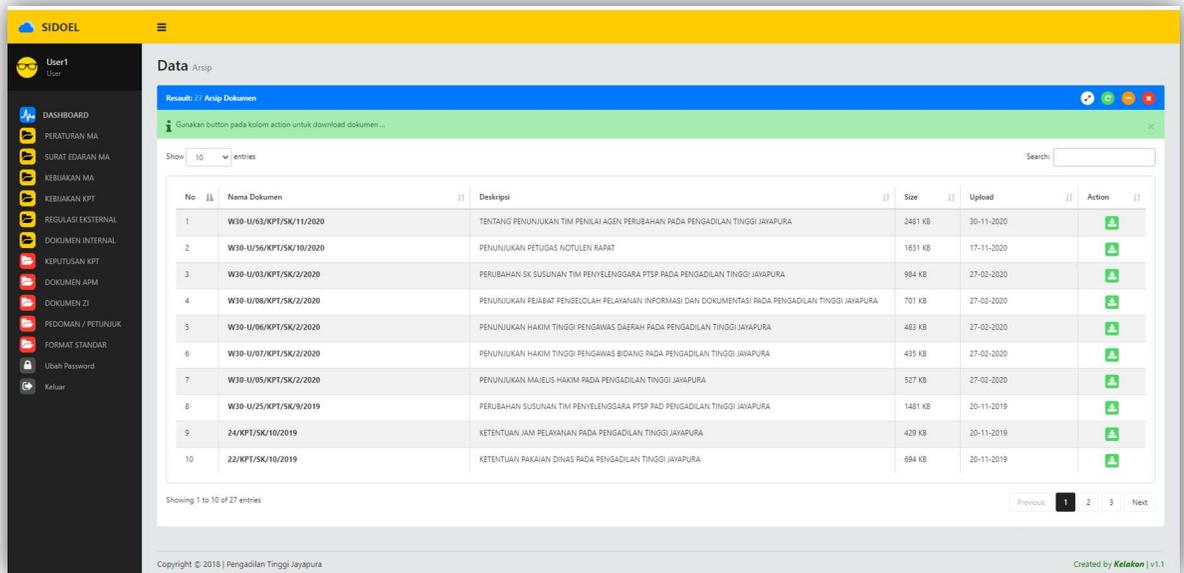
- Memberikan Informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
  - Dokumen Peraturan Mahkamah Agung
  - Dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung
  - Kebijakan Mahkamah Agung lainnya ( SK, Instruksi, dll)
  - Dokumen Keputusan dan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi
  - Kebijakan instansi lain yang terkait dan menunjang kinerja pengadilan
  - Dokumen pendukung dalam Akreditasi Penjaminan Mutu
  - Dokumen pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas
- Mempermudah akses informasi regulasi dan kebijakan pendukung kinerja
- Sebagai bentuk pengarsipan dokumen secara elektronik

Berikut beberapa tampilan Aplikasi SIDOEL :



The screenshot shows the "Data" view of the application with the following table:

No	Nama Dokumen	Deskripsi	Size	Upload	Action
1	PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020	ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	9353 KB	09-11-2020	[Download]
2	PERMA NOMOR 3 TAHUN 2020	PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNITA	8858 KB	09-11-2020	[Download]
3	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KERANTERAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN	2750 KB	09-11-2020	[Download]
4	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020	PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	9295 KB	09-11-2020	[Download]
5	PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2015	2116 KB	22-10-2019	[Download]
6	PERMA NOMOR 3 TAHUN 2019	TATA CARA PENGAJIAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	3047 KB	22-10-2019	[Download]
7	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019	PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA... sdt	2762 KB	23-10-2019	[Download]
8	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019	ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	4941 KB	22-10-2019	[Download]
9	PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018	TENTANG KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING RADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN	264 KB	26-10-2018	[Download]
10	PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KERANTERAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN	264 KB	26-10-2018	[Download]

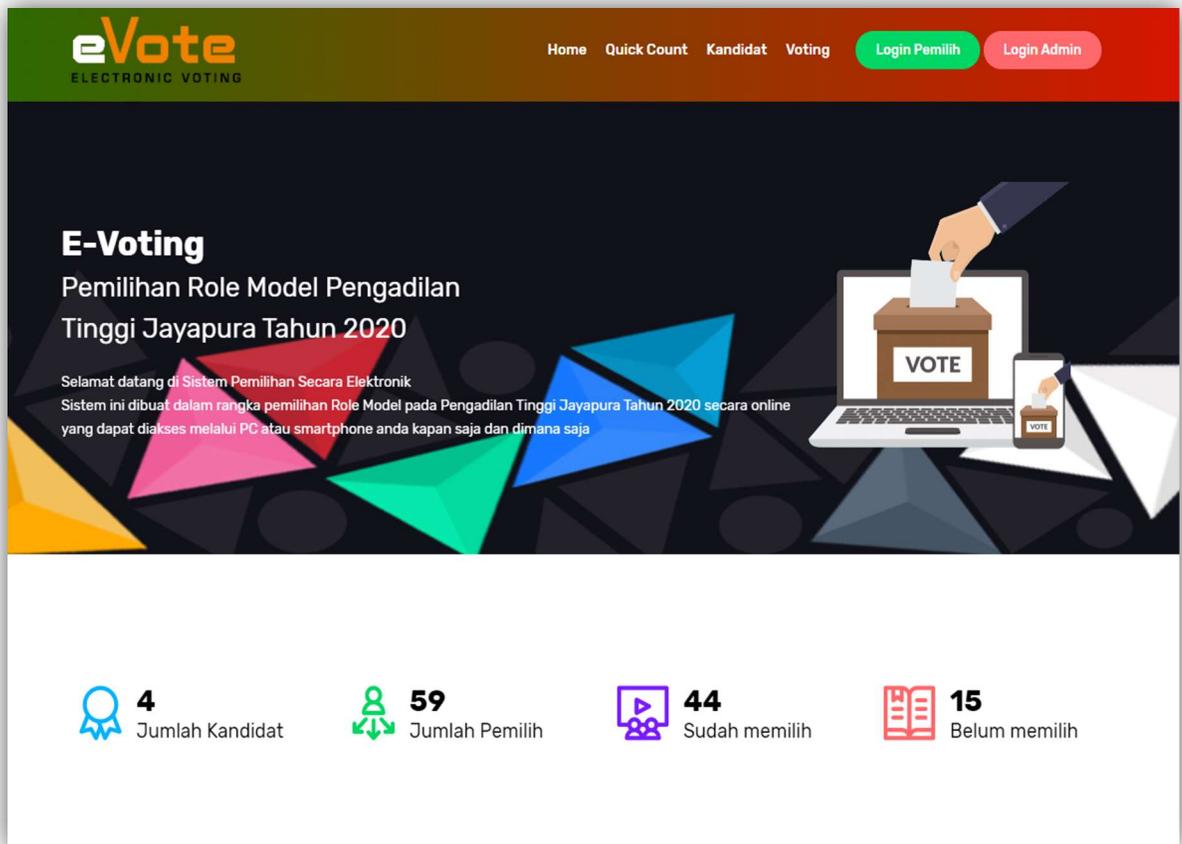


## 6. Aplikasi E-VOTE

E-Vote merupakan system pemilihan secara elektronik yang dibuat untuk mempermudah akses proses pemilihan dan mengetahui profil kandidat dan hasil voting secara mandiri, online dan update yang dapat diakses melalui computer maupun smart phone dimana saja dan kapan saja sesuai jadwal vote yang ditentukan.

Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat situs <https://evoting.pt-jayapura.info/> adapun manfaat dari fasilitas ini adalah:

- ✓ Sistem pemilihan secara online dan dapat di akses kapan saja dan dimana saja
- ✓ Pemilih dapat mengetahui profil kandidat pilihan
- ✓ Data voting/pemilihan dijamin kerahasiaanya, hanya pemilih yang mengetahui data kandidat yang dipilih dengan autentikasi kode unik
- ✓ Hasil voting terbuka untuk umum dan terupdate secara realtime
- ✓ Data voting tersimpan secara elektronik



Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

PN Jayapura	PN Sorong	PN Merauke
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mesin antrian PTSP, untuk memudahkan layanan pada PTSP yang lebih baik kepada pencari keadilan.</li> <li><input type="checkbox"/> Mesin EDC untuk mendukung e-Court dan survey IKM dan IPK.</li> <li><input type="checkbox"/> Payment bank BTN untuk menyetero uang perkara.</li> <li><input type="checkbox"/> Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.</li> <li><input type="checkbox"/> Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SIPINANG (Sistem Informasi Pidana di Pengadilan), membantu dalam alur penerimaan Persetujuan Penyitaan maupun Penggeledahan.</li> <li><input type="checkbox"/> RAJAWALI (Sasaran Kerja Pegawai Online), membantu dalam membuat SKP secara online oleh masing-masing pegawai.</li> <li><input type="checkbox"/> Wifi untuk Pengunjung Sidang, koneksi wifi gratis bagi pengunjung sidang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aplikasi SIPEN-MRK (Sistem Informasi Pengadilan Negeri Merauke) Aplikasi virtual assitant berbasis whatsapp bot untuk memberikan informasi layanan pengadilan untuk masyarakat, stakeholder internal dan eksternal.</li> <li><input type="checkbox"/> e-Reminder KGB dan KP, untuk mengingatkan dan memproses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (KP).</li> <li><input type="checkbox"/> e-Service, pelayanan yang dilakukan PN Merauke menggunakan teknologi informasi / media sosial.</li> <li><input type="checkbox"/> Simetaline (Surat Ijin Mengunjungi Tahanan Online), dapat diakses keluarga/kerabat terdakwa yang ingin mengunjungi secara daring.</li> <li><input type="checkbox"/> e-Survey, aplikasi untuk mengetahui penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PN Merauke dan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK).</li> <li><input type="checkbox"/> e-Court Corner: Masuk Distrik Pojok informasi tentang e-Court para masyarakat dapat mengetahui informasi tentang e-Court di Kantor Distrik Uluilin, Jagebob, Elikobel, Muting dan Animha</li> <li><input type="checkbox"/> Aplikasi Sipidum (Sistem Informasi Pidana Umum) untuk pelayanan perpanjangan penahanan dan ijin penyitaan yang dilakukan secara online sehingga kejaksaaan, kepolisian, lapas, babas dapat mengakses dari jarak jauh.</li> <li><input type="checkbox"/> dll</li> </ul>

**PN Nabire**

- E-Survey, Survey Indeks Persepsi Korupsi PN Nabire.
- Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website.
- Elektronik Surat Izin Besuk pada Pengadilan Negeri Nabire
- SPT (Sistem Pidana Terintegrasi), sistem peradilan pidana yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Nabire.
- Antrian PTSP Elektronik.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

**PN Serui**

- Audio Gratifikasi, diperdengarkan untuk semua pengunjung PN Serui.
- Eraterang, untuk keperluan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Serui.
- VAIS (Virtual Assistant Information Sistem), menampilkan jadwal informasi sidang, disposisi surat PTSP, mengecek tunggakan pada aplikasi MIS melalui fitur whatsapp.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

**PN Biak**

- Aplikasi Pemanggilan Sidang, pelayanan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, layaknya panggilan nasabah bank.
- E-Tilang, pelayanan kepada masyarakat untuk menemukan informasi denda tilang yang akan dibayarkan di Kantor Kejaksaan.
- Insos Tivani (Informasi Seputar Aktivitas Pengadilan Negeri), layanan chat bot virtual seputar informasi mengenai PN Biak.
- Antrian Layanan, membantu nomor antrian layanan.
- SP2T (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), mempermudah proses administrasi penyidikan baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Lembaga Pemasyarakatan.

**PN Kota Timika**

- Audio Peringatan Anti Gratifikasi.
- viaMENO, aplikasi menjawab otomatis lewat aplikasi whatsapp.
- Monitor Jadwal Sidang Perkara.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.
- Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.

**PN Fakfak**

- Posbakum Online, layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id
- Pojok e-court, pojok informasi tentang e-court.
- Visualisasi Video untuk E-Court, Gratifikasi. Penyampaian informasi mengenai e-Court dan gratifikasi berupa video.
- Eraterang, pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

**PN Manokwari**

- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Manokwari.

**PN Wamena**

- Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website pada Pengadilan Negeri Wamena.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Wamena.

**PN Kaimana**

- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Kaimana.
- Eraterang, pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Kaimana.

## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

#### 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Setiap atasan langsung wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pengawasan melekat secara lengkap tertuang dalam Perma 8 tahun 2016.

#### 2. Pengawasan Bidang

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/39/KPT/SK/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Ket
1	Kepaniteraan Perdata	- SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	
2	Kepaniteraan Pidana	- ISJUAEDI, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH.	

3	Kepaniteraan Khusus Tipikor	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH.	
5	Kepaniteraan Hukum	- ADHAR, S.H., M.H. - SUPOMO, S.H., M.H.	
6	Sub Bagian Kepegawaian dan IT	- Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.	
7	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	- ANDI ASTARA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	
8	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	- WISMONOTO, S.H. - HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.	
9	Sub Bagian Tata Usaha dan Tumah Tangga	- WISMONOTO, S.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	

### 3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Nomor: W30-U/69/KPT/SK/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan	Ket.
1	- Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - WISMONOTO, S.H. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H.	PN JAYAPURA	
2	- SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	PN SORONG	
3	- ADHAR, S.H., M.H. - Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.	PN MERAUKE	

## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

#### 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Setiap atasan langsung wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pengawasan melekat secara lengkap tertuang dalam Perma 8 tahun 2016.

#### 2. Pengawasan Bidang

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/39/KPT/SK/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Ket
1	Kepaniteraan Perdata	- SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	
2	Kepaniteraan Pidana	- ISJUAEDI, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH.	

3	Kepaniteraan Khusus Tipikor	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH.	
5	Kepaniteraan Hukum	- ADHAR, S.H., M.H. - SUPOMO, S.H., M.H.	
6	Sub Bagian Kepegawaian dan IT	- Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.	
7	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	- ANDI ASTARA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	
8	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	- WISMONOTO, S.H. - HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.	
9	Sub Bagian Tata Usaha dan Tumah Tangga	- WISMONOTO, S.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	

### 3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Nomor: W30-U/69/KPT/SK/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan	Ket.
1	- Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - WISMONOTO, S.H. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H.	PN JAYAPURA	
2	- SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	PN SORONG	
3	- ADHAR, S.H., M.H. - Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.	PN MERAUKE	

4	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. - Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H.	PN MANOKWARI	
5	- ISJUAEDI, S.H., M.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	PN TIMIKA	
6	- SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.	PN WAMENA	
7	- ISJUAEDI, S.H., M.H. - HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.	PN NABIRE	
8	- SUPOMO, S.H., M.H. - HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.	PN SERUI	
9	- ADHAR, S.H., M.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	PN BIAK	
10	- WISMONOTO, S.H. - SUPOMO, S.H., M.H.	PN FAKFAK	
11	- ANDI ASTARA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	PN KAIMANA	

Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura secara rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan jarak jauh yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui teleconference/zoom meeting untuk pengawasan jarak jauh.

Pengawasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretarian dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- a. Memeriksa program kerja.
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/ pelaksanaan program kerja.
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
- d. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura.

e. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 dimana harus mematuhi aturan *social distancing*, maka pelaksanaan tugas peradilan termasuk pengawasan dan pembinaan harus dilaksanakan dengan jarak jauh (*remote distance*). Untuk itu diperlukan sebuah wadah yang memfasilitasi monitoring, evaluasi dan koordinasi antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan aplikasi monitoring dan evaluasi serta pembinaan, maka setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dipantau sewaktu-waktu (*realtime*) serta memudahkan koordinasi secara jarak jauh antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya.



Fasilitas Command Center diharapkan dapat menjawab tantangan “jarak jauh” karena letak geografis Pengadilan Negeri di wilayah Papua dan Papua Barat yang hampir seluruhnya harus dijangkau

dengan menggunakan pesawat dan biaya tinggi serta resiko tinggi sehingga pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dapat dilakukan dengan biaya ringan, intensitas dapat meningkat sekaligus manajemen resiko dapat diterapkan karena melalui beberapa sistem Aplikasi Pengadilan Tinggi Jayapura sewaktu-waktu (*realtime*) dapat memonitoring serta mengevaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura serta memudahkan koordinasi secara jarak jauh antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya.





Dalam hubungannya dengan pembangunan Zona Integritas, fasilitas ini dapat menghindarkan penyimpangan penggunaan anggaran pengawasan dan pembinaan yang sekaligus merupakan inovasi dalam membangun budaya kerja yang baru.

Pengawasan yang bersifat reguler/ rutin pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan maksud untuk :

- a) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- b) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c) Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d) Menilai kinerja aparat peradilan.
- e) Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).

## **B. EVALUASI**

### **1. Pengawasan Melekat**

Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan rapat secara berjenjang minimal 1 (satu) bulan sekali dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bagian agar tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Atasan langsung pada masing-masing bagian wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.

Atasan langsung merekomendasikan tindak lanjut kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.

Hasil rapat berjenjang akan dibawa ke rapat rutin bulanan/pleno yang akan membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi hasil temuan dibagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang.

## **2. Pengawasan Bidang**

Hakim Tinggi Pengawas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan pada bidang/bagian yang ada melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab bidang/bagian masing-masing secara periodik minimal 1(satu) bulan sekali dengan menghadiri rapat berjenjang setingkat eselon IV yang dilakukan setiap bulan.

Laporan hasil pengawasan bidang/bagian kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

## **3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)**

Pengawasan rutin/reguler ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Hakim Tinggi Pengawas Daerah menyampaikan hasil pengawasan pada Pengadilan Negeri setelah selesai melakukan pengawasan serta membuat laporan hasil pengawasan daerah dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku koordinator pengawasan, untuk dibuatkan resume hasil pengawasan dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

Hasil pengawasan berupa temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura, segera ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang kami susun ini, memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum pada peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI.
2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis baik kualitas maupun kuantitasnya masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.
3. Pengawasan Internal terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah dijalankan dengan tertib namun masih terus dilakukan peningkatan kualitas bagi Para Hakim Pengawas.
4. Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan ketertiban pencatatannya.
5. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura cukup baik, namun perlu ditingkatkan terus untuk mendukung perkembangan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru.

### **B. REKOMENDASI**

1. Agar sosialisasi kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru terus menerus ditingkatkan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Agar ditingkatkan alokasi pagu anggaran untuk Bimbingan Teknis baik untuk tenaga teknis maupun nonteknis demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penambahan formasi sumber daya manusia (hakim dan pegawai) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.

3. Agar pengawasan lebih efektif dan obyektif, maka anggaran untuk pengawasan perlu ditingkatkan.
4. Perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan aset agar dapat dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
5. Perlu ditingkatkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru dan pelaksanaan Tugas Pokok peradilan umum.